



BUKU II

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS



**Kabupaten Maros | Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022**

KATA SAMBUTAN KEPALA DAERAH

Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Maros dapat diselesaikan dengan baik.

Sebuah program dapat terlaksana dengan baik jika direncanakan secara komprehensif. Masterplan Smart City ini sebuah perencanaan program yang telah disusun secara partisipatif dan melibatkan seluruh stakeholder.



Smart City adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, melalui pengelolaan sumberdaya dan komunitas yang ada yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman. Mengembangkan smart city bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir tetapi lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Dan tentu saja, pembangunan berbasis smart city secara simultan harus bisa menghasilkan smart people dan smart society. Pembangunan Smart City juga tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler.

Masterplan Smart City ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kabupaten. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah, Masterplan Smart City mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah daerah. Masterplan Smart City juga memastikan proses transformasi menuju konsep Kabupaten cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis smart city dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan direview setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

Semoga Masterplan Smart City Kabupaten Maros ini dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Kabupaten Maros dengan cerdas sehingga

pembangunan di Kabupaten Maros dapat terus berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Maros, Oktober 2022

BUPATI MAROS

H.A.S CHAIDIR SYAM, S.Ip, MM

KATA SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

Alhamdulillah seluruh rangkaian proses penyusunan *Master Plan Smart City* Kabupaten Maros telah selesai dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan kami melaksanakan Bimbingan Teknis didampingi oleh Tim Pembimbing Penyusunan Masterplan Smart City ini menggunakan paradigma berbasis enam pilar, meliputi : Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment.



Dari sisi penguatan smart governance, implementasi smart city dengan adanya pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan penguatan informasi publik. Sementara itu, dari sisi smart ekonomi dan smart branding ditunjukkan dengan adanya penguatan UMKM, inovasi produk, dan pemasaran dengan pemanfaatan ICT dan perubahan gaya masyarakat dalam mengakses layanan ekonomi secara online. Sementara dalam penguatan smart society dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu budaya gotong royong dan masyarakat cerdas yang tercermin dalam kemampuan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi. Sedangkan untuk smart environment dan smart living berupa budaya hidup sehat dan kesadaran akan kelestarian lingkungan. Ke enam pilar tersebut saling terkait dan menyentuh seluruh dinamika yang terjadi di Kabupaten Maros dan penghuninya. Dengan begitu, Masterplan Smart City diharapkan bisa menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Maros.

Pemerintah Kabupaten Maros selalu berkomitmen untuk melaksanakan Program Smart City dengan sungguh-sungguh. Mudah mudahan dampak positif implementasi Smart City ini dapat dirasakan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Saya berharap Program Smart City ini dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maros.

Master Plan Smart City Kabupaten Maros disusun oleh tenaga ahli yang disediakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai penyusun Masterplan Smart City Kabupaten Maros dan sekaligus sebagai pembicara/ narasumber pada bimbingan teknis dengan keterlibatan seluruh stakeholder baik pemerintah (Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros) maupun swasta yang bersinergis dan berkolaborasi serta bersepakat bahwa program smart city merupakan gerakan bersama dan berkelanjutan. Dalam menyusun master plan ini, Tim Penulis Smart City

Kabupaten Maros tetap memperhatikan kearifan lokal dalam nomenklatur program-program Smart City Kabupaten Maros dengan harapan seluruh program-program Smart City Kabupaten Maros dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Master Plan Smart City ini, semoga segala upaya kita mendapatkan ridho dari Allah SWT

Maros, Oktober 2022

SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya buku **Masterplan Smart City Kabupaten Maros** ini. Sebagai salah satu luaran dari kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Maros yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Buku III ini diharapkan mampu untuk menjadi pedoman dalam pembangunan kota cerdas di Kabupaten Maros.

Penyusunan master plan smart city Kabupaten Maros merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyambut era digital dan transformasi model penyelenggaraan pemerintahan modern. Pada kegiatan ini, Tim Penyusun Master Plan Smart City Kabupaten Maros telah menyelesaikan serangkaian kegiatan, termasuk melaksanakan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Rangkaian Kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Maros menghasilkan 4 dokumen luaran, yaitu: (1) Buku Analisis Strategis Smart City Kabupaten Maros, (2) Buku Master Plan Smart City Kabupaten Maros, (3) Buku Executive Summary, dan (4) Buku Program Quick Win Smart City Kabupaten Maros. Dokumen-dokumen perencanaan smart city tersebut dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara “cerdas”, berbasis pada inovasi-inovasi yang didukung dengan adanya teknologi informasi. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui pendekatan kota cerdas merupakan hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena karakter pembangunan smart city yang adaptif dengan perkembangan zaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keselarasan, kesinambungan, dan keberlanjutan. Melalui pembangunan kpta cerdas, Kabupaten Maros dapat meningkatkan kualitasnya selaku regulator daerah dan memberikan pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bupati dan Wakil Bupati Maros, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung dan membantu rangkaian kegiatan penyusunan master plan smart City Kabupaten Maros , sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Maros dan segenap jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan pekerjaan ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini memberikan berkah yang melimpah bagi banyak pihak. Amin.

Yogyakarta, Oktober 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DAERAH	ii
KATA SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN <i>SMART CITY</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan	3
I.3. Landasan Hukum	4
I.4. Kerangka Pikir	6
BAB II. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN MAROS	20
II.1. Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Kabupaten Maros	21
II.1.1. Visi dan Misi Smart City	21
II.1.2. Sasaran Smart City Kabupaten Maros	24
II.2 Indikator Utama Smart City Kabupaten Maros	27
BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i> KABUPATEN MAROS.....	32
III.1 Strategi Smart Governance.....	32
III.2 Strstegi Smart Branding	33
III.3. Strstegi Smart Economy	33
III.4. Strstegi Smart Living	34
III.5. Strstegi Smart Society	34
III.6. Strstegi Smart Environment	35
BAB IV. RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN MAROS	36
IV.1. Rencana Aksi Smart Governance	37
IV.2. Rencana Aksi Smart Branding	46
IV.3. Rencana Aksi Smart Economy	48

IV.4. Rencana Aksi Smart Living	57
IV.5. Rencana Aksi Smart Society	60
IV.6. Rencana Aksi Smart Environment	70
BAB V. PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN MAROS	73
V.1. Peta Jalan Smart Governance	74
V.2. Peta Jalan Smart Branding	88
V.3. Peta Jalan Smart Economy	92
V.4. Peta Jalan Smart Living.....	106
V.5. Peta Jalan Smart Society	111
V.6. Peta Jalan Smart Environment	127
BAB VI. PENUTUP	132
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar I - 1 Smart City Readiness (Sumber Citiasia Inc., 2016)	7
Gambar I - 2 Smart City Maturity Model (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))	8
Gambar I - 3 Struktur Smart Governance (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))	10
Gambar I - 4 Struktur Smart Branding (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))	11
Gambar I - 5 Struktur Smart Economy (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))	13
Gambar I - 6 Struktur Smart Living Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)	14
Gambar I - 7 Struktur Smart Society (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))..	16
Gambar I - 8 Smart Environment (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))	17
Gambar I - 9 Keterkaitan Antara Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Smart City (Sumber: Analisis Pemetaan Regulasi Terkait Perencanaan Pembangunan dan Smart City) .	18
Gambar I - 10 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel II - 1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Maros dan misi smart city Kabupaten Maros	23
Tabel II - 2 Sasaran Smart City Kabupaten Maros dan Keterkaitannya Dengan RPJMD.....	25
Tabel II - 3 Indikator-indikator utama smart city Kabupaten Maros	27
Tabel III - 1 Arahan Strategi untuk Smart Governance	32
Tabel III - 2 Arahan Strategi untuk Smart Branding	33
Tabel III - 3 Arahan Strategi untuk Smart Economy	33
Tabel III - 4 Arahan Strategi untuk Smart Living.....	34
Tabel III - 5 Arahan Strategi untuk Smart Society	35
Tabel III - 6 Arahan Strategi untuk Smart Environment	35
Tabel IV - 1 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Governance.....	37
Tabel IV - 2 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Governance.....	37
Tabel IV - 3 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Governance	41
Tabel IV - 4 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Branding	46
Tabel IV - 5 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Branding	46
Tabel IV - 6 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Branding	47
Tabel IV - 7 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Economy	48
Tabel IV - 8 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Economy.....	49
Tabel IV - 9 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Economy	52
Tabel IV - 10 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Living	57
Tabel IV - 11 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Living	58
Tabel IV - 12 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Living	58
Tabel IV - 13 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Society	60
Tabel IV - 14 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Society	61
Tabel IV - 15 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Society	64
Tabel IV - 16 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Environment	70
Tabel IV - 17 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Environment	70
Tabel IV - 18 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Environment	71
Tabel V - 1 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance Tahun 2023-2032.....	74
Tabel V - 2 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Governance Tahun 2023-2027.....	75
Tabel V - 3 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Governance Tahun 2023-2024.....	81

Tabel V - 4 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding Tahun 2023-2032	88
Tabel V - 5 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Branding Tahun 2023-2027	89
Tabel V - 6 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Branding Tahun 2023-2024	90
Tabel V - 7 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy Tahun 2023-2032.....	92
Tabel V - 8 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Economy Tahun 2023-2027.....	94
Tabel V - 9 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Economy Tahun 2023-2024.....	100
Tabel V - 10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living Tahun 2023-2032	106
Tabel V - 11 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Living Tahun 2023-2027	107
Tabel V - 12 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Living Tahun 2023-2024	108
Tabel V - 13 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society Tahun 2023-2032	111
Tabel V - 14 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Society Tahun 2023-2027	113
Tabel V - 15 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Society Tahun 2023-2024	119
Tabel V - 16 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment Tahun 2023-2032	127
Tabel V - 17 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Environment Tahun 2023-2027	128
Tabel V - 18 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Environment Tahun 2023-2024	130

BAB I. PENDAHULUAN

Buku Masterplan Smart City Kabupaten Maros pada Bab 1 terdiri dari empat bagian yang meliputi latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan kerangka pikir. Pertama, membahas tentang alasan dasar penyusunan buku masterplan smart city serta informasi, kondisi, dan gambaran umum terkait Kabupaten Maros. Kedua, berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan buku masterplan smart city Kabupaten Maros. Kemudian dilanjutkan oleh rujukan maupun regulasi daerah dan nasional terkait pelaksanaan program smart city. Yang terakhir merupakan kerangka pikir yang menjelaskan hubungan antara buku Masterplan Smart City dengan RPJMD, Renstra OPD, dokumen masterplan atau perencanaan lainnya.

I.1. Latar Belakang

Tren global dalam perkembangan teknologi menuntut kota-kota di seluruh dunia menjadi produktif, inovatif, dan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan. Percepatan teknologi dan informasi mengharuskan semua aspek dalam kehidupan untuk beradaptasi dengan cepat, termasuk dalam permasalahan kota. Dalam rangka menindak lanjuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada perkotaan, maka muncul sebuah konsep pembangunan kota cerdas dengan optimalisasi teknologi. Untuk itu, sebagai wujud adaptasi dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, Kabupaten Maros melakukan pembangunan pada program smart city.

Tujuan utama smart city adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Optimalisasi teknologi bertujuan untuk membuka informasi secara optimal yang saling berhubungan yang tersedia saat ini untuk lebih memahami dan mengontrol serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, smart city merupakan kerangka kerja teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan, menyebarkan, dan mempromosikan praktik pembangunan untuk mengatasi tantangan perkotaan dan menciptakan infrastruktur yang didukung teknologi dan berkelanjutan.

Kabupaten Maros pada awalnya merupakan wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu. Kerajaan tersebut dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat

Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah. Pada waktu itu, Maros sudah memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yaitu Suku Bugis dan Suku Makassar.

Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, menjelaskan Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Propinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar.

Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau 3,53% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Secara geografis, letak Kabupaten Maros sangat strategis karena sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Perencanaan pembangunan daerah melalui konsep Smart City telah menjadi tren di seluruh penjuru dunia, termasuk daera-daerah di Indonesia. Di era modern, konsep Smart City bukan lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyejahterakan rakyatnya. Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2017 telah membantu banyak daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya melalui pendekatan smart city. Kabupaten Maros menyampaikan ketertarikannya untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep Smart City atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan melalui pendekatan Smart City, maka akan terbentuk ruang inovasi tanpa batas untuk menyelesaikan berbagai persoalan, memenuhi kebutuhan, dan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Maros dengan memanfaatkan teknologi sebagai faktor pendorong utama.

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka

dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”

Kata “sejahtera” memiliki makna bahwa masyarakat Maros dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan. “Religius” memiliki makna terciptanya kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.

Sementara itu kata “berdaya saing” berarti terwujudnya kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global pada masa yang akan datang yang meliputi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi. Berdasarkan visi Kabupaten Maros maka disusunlah visi smart city Kabupaten Maros, yaitu:

“Menuju Kabupaten Maros yang Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing dengan Kecerdasan yang Harmonis”

Pada akhirnya “kecerdasan dalam harmoni” juga dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menempatkan inovasi yang didorong oleh pemanfaatan teknologi (TIK) dalam proses-proses yang dijalankan secara harmonis. Sehingga, pengembangan smart city di Kabupaten Maros dapat membuat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan cerdas dan mecerdaskan masyarakat untuk mencapai harmoni kebersamaan.

I.2. Tujuan

Masterplan Smart City merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya (road map). Inisiatif smart city dibuat berdasarkan permasalahan yang muncul di Kabupaten Maros berdasarkan analisis dari RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, serta hasil FGD selama Bimtek Smart City. Sehingga, analisis dalam masterplan menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi yang secara umum bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

3. Meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
4. Meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup.

Implementasi dari inisiatif dalam masterplan smart city dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kota, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan. Sehingga, pengembangan smart city di Kabupaten Maros tidak hanya terfokus pada penggunaan TIK, namun juga dapat memaksimalkan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki.

I.3. Landasan Hukum

Dalam pengembangan smart city, salah satu aspek yang dilihat adalah perkembangan kebijakan dan regulasi kebijakan daerah. Hal ini merupakan elemen yang sangat signifikan mengingat seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah harus memiliki payung hukum yang jelas. Produk hukum yang berlaku juga akan memengaruhi seberapa jauh implementasi program bisa dilakukan dengan dukungan legal yang mengikat. Berikut merupakan regulasi ataupun aturan pemerintah terkait pengembangan smart city di Kabupaten Maros:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Telematika di Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 57/KEP/M.Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang PPID;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Jaringan Bergerak Seluler;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Kota Cerdas di Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2021;
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;

19. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 309/KPTS/496/1/2022 tentang Pembentukan Dewan Smart City dalam lingkup Kabupaten Maros tahun 2022; dan
20. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 310/KPTS/496/12022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Smart City dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022.

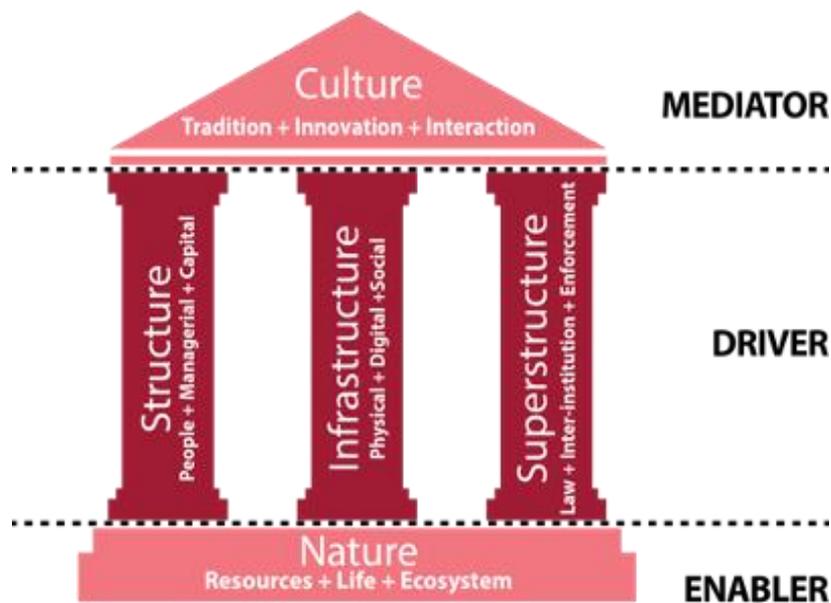
I.4. Kerangka Pikir

Smart city merupakan sebuah kerangka masa depan yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan perkotaan. Kerangka smart city dilakukan dengan melakukan integrasi infrastruktur jaringan ke aplikasi cerdas yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan efisiensi jaringan listrik, mengotomatiskan pembacaan meteran utilitas, dan mengotomatiskan berbagai proses manual sebelumnya. Selain itu, smart city juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang berada di wilayah perkotaan.

Alur kerja smart city membuat seluruh lembaga bekerja sama saling membantu untuk mengisi kekosongan yang tidak hanya bisa ditutup oleh suatu lembaga dan menuntut adanya *cross-cutting* lintas lembaga. Secara sederhana, smart city adalah kerangka kerja yang berkolaborasi antara teknologi informasi dan komunikasi, teknologi *internet of things*, dan individu sebagai sumber daya manusia sekaligus pembuat kebijakan untuk mengatasi isu strategis perkotaan dan menciptakan pembangunan secara berkelanjutan. Selain berfokus pada pengoptimalan teknologi, manusia juga merupakan elemen yang penting dalam pembangunan program smart city. Salah satunya adalah pembuat kebijakan dan perencana kota yang berperan dalam menerapkan desain, program, kebijakan, dan proses yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan menuju kota cerdas yang ideal.

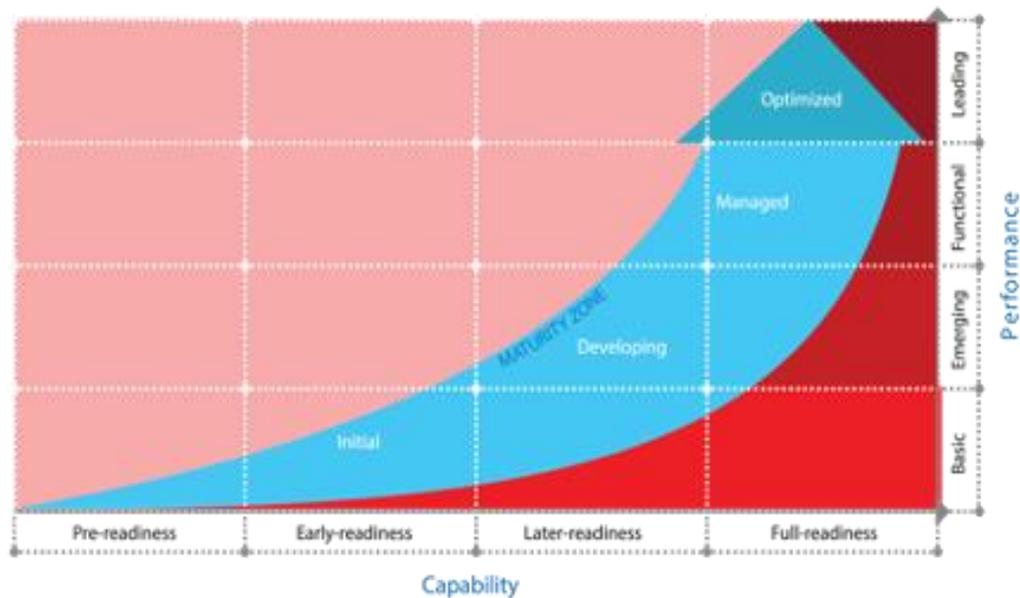
Dalam proses pembangunan Smart City, Kabupaten Maros melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan Maros Smart City. Agar mendapatkan gambaran tentang kesiapan daerah, maka dilakukan analisis kesiapan Smart City untuk Kabupaten Maros dalam melakukan pembangunan daerah dengan pendekatan smart city. Tiga komponen utama yang menjadi pilar dalam analisis kesiapan daerah adalah kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. Analisis struktur dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Maros yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, serta kapasitas dan kapabilitas daerah. Kesiapan infrastruktur di

Maros memberi gambaran terkait kondisi sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam pembangunan Smart City. Suprastruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Maros, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan Smart City agar dapat direalisasikan secara ideal dan logis berdasarkan analisis kesiapan daerah lainnya.



Gambar I - 1 Smart City Readiness (Sumber Citiasia Inc., 2016)

Kota yang cerdas merupakan gambaran umum dari suatu daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam segala aspek agar menjadi daerah yang layak dan nyaman huni. Oleh karena itu, terdapat enam dimensi yang menjadi acuan dalam pengembangan smart city di Kabupaten Maros. Dimensi Smart City yang menjadi aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), pertumbuhan ekonomi (*Smart Economy*), citra kota/daerah (*Smart Branding*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*). Masing-masing dimensi memiliki sub-dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.



Gambar I - 2 Smart City Maturity Model (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Selain kesiapan daerah, tingkat kematangan smart city juga dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam perancangan program smart city. Kematangan smart city dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu initial yang merupakan tingkat awal dalam proses pembangunan smart city; developing artinya suatu daerah sudah mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis Smart City dan memiliki dukungan Smart City Readiness yang cukup baik; managed berarti secara umum suatu daerah telah berada pada tingkat pelaksanaan smart city dengan baik pada berbagai aspek dengan dukungan readiness yang sangat baik pula; serta optimized yang berarti tingkat penyempurnaan pembangunan program smart city pada berbagai elemen, dimensi, dan aspek.

1. Smart Governance

Sasaran : Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Sub-dimensi Smart Governance:

a. Pelayanan Publik

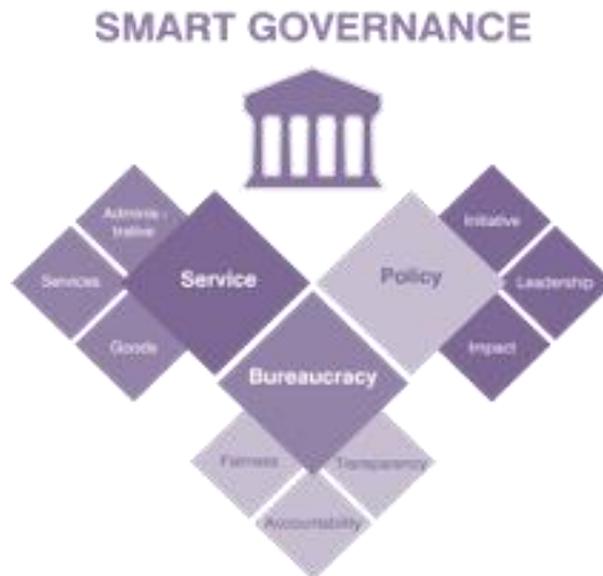
- Pelayanan administrasi kepada masyarakat yang meliputi: status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang;
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain; dan
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi yang Efisien

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam sub-dimensi ini seperti sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat menyederhanakan sistem birokrasi pada suatu daerah. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.

c. Efisiensi Kebijakan Publik.

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan; dan
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Melalui dua indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah.



Gambar I - 3 Struktur Smart Governance (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart governance merupakan penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dalam badan pemerintahan. Pembangunan tata kelola pemerintahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan proses demokrasi dan mengubah cara pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi. Smart governance juga berperan dalam memastikan lingkungan yang kolaboratif, transparan, partisipatif, berbasis komunikasi dan berkelanjutan bagi warga negara dan pemerintah. Dengan kata lain, smart governance berbicara tentang efisiensi layanan publik kota pintar dan peningkatannya melalui inovasi tanpa melupakan inklusivitas demokratis penghuninya.

2. Smart Branding

Sasaran : Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sub-dimensi Smart Branding:

a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*);
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, dan lain-lain; dan

- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.
- Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah
- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya *marketplace* daerah;
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah; dan
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.
- Membangun dan memasarkan wajah atau citra kota.
- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional; dan
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.



Gambar I - 4 Struktur Smart Branding (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart Branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan suatu daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tersebut. Branding ini bukan hanya semata untuk membuat suatu kota menjadi terkenal tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, smart branding juga bertujuan untuk mewujudkan penataan wajah Daerah Kota melalui optimalisasi sumber daya yang berpotensi sebagai *brand value* daerah.

3. Smart Economy

Sasaran : Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *cashless society*.

Sub-dimensi Smart Economy:

a. Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing

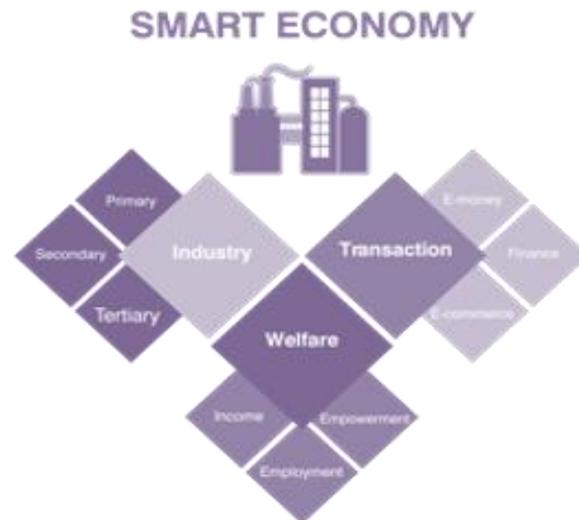
Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*); dan
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

c. Membangun Ekosistem Keuangan Daerah

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *cashless*;
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan; dan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace*.



Gambar I - 5 Struktur Smart Economy (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart Economy adalah ekonomi yang berbasis pada inovasi teknologi, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Smart Economy mengadopsi inovasi, inisiatif kewirausahaan baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat. Lebih jauh lagi, smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang dapat memenuhi tantangan di era digitalisasi dan menghasilkan lebih banyak produk maupun layanan dengan lebih sedikit energi dan polusi, serta menciptakan manfaat sosial.

4. Smart Living

Sasaran : Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Sub-dimensi Smart Living:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Sarana Prasarana Keseharian

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi

Transportasi merupakan aspek terpenting dalam proses distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sub-dimensi ini merupakan pilar penting yang memiliki indikator untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.



Gambar I - 6 Struktur Smart Living Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Smart living merupakan pembangunan tata kelola dalam peningkatan kualitas hidup yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, smart living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Selain itu, Smart Living juga bergantung pada pendidikan, budaya, dan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat atau warga kota yang terdidik akan memiliki budaya dan disiplin tinggi dalam menjalankan kehidupan cerdas yang saling menghormati hukum dan hak-hak sesama.

5. Smart Society

Sasaran : Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sub-dimensi Smart Society:

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien

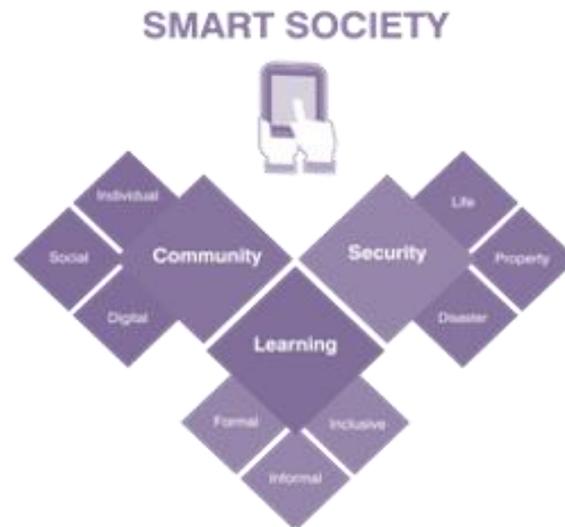
- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang *marketplace* dan program lainnya yang mendukung terciptanya iklim positif di antara masyarakat.

b. Ekosistem Belajar yang Efisien

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas; dan
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan program pembelajaran lainnya.

c. Sistem Keamanan yang Mampu Melindungi Masyarakat

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing* (IoT)



Gambar I - 7 Struktur Smart Society (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart society merupakan pembangunan tata kelola masyarakat yang berfokus pada interaksi antar individu yang bergerak menuju ekosistem sosio teknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan masyarakat kota yang semakin terjalin secara intensif. Selain itu, smart society juga menargetkan terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik.

6. Smart Environment

Sasaran: Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Sub-dimensi Smart Environment:

a. Pengembangan Program Proteksi Lingkungan

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing* (IoT);
- Membangun ruang terbuka hijau;
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi; dan
- Mengendalikan polusi udara.

b. Tata Kelola Sampah dan Limbah

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*);

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*);
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*); dan
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. Ketiga, mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

Penggunaan sumber daya alam termasuk energi merupakan hal yang tidak bisa diindari, namun dapat dikendalikan sehingga tidak memberikan dampak kerusakan alam yang besar. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan alternatif lainnya.

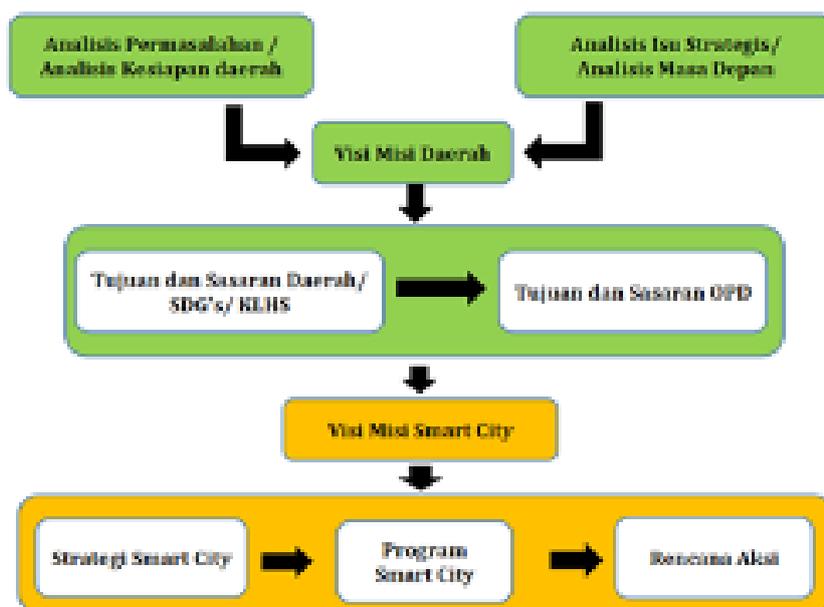


Gambar I - 8 Smart Environment (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart environment merupakan pembangunan lingkungan hidup yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang cerdas diartikan juga sebagai lingkungan yang bisa

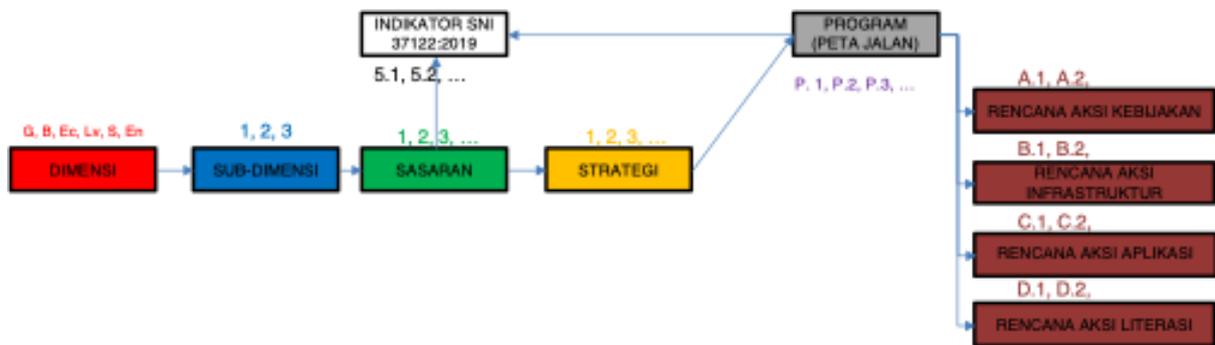
memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, serta ruang hijau terbuka yang stabil. Smart environmen menekankan pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, artinya pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan manfaatnya bisa dinikmati untuk generasi sekarang hingga mendatang.

Pengembangan smart city di Kabupaten Maros tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak saling menopang satu sama lain. Dokumen masterplan smart city Kabupaten Maros merupakan turunan dari visi dan misi daerah dalam menentukan rencana aksi dan inovasi kegiatan. Hal ini tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan, dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Maros agar pengembangan smart city dapat direalisasikan.



Gambar I - 9 Keterkaitan Antara Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Smart City (Sumber: Analisis Pemetaan Regulasi Terkait Perencanaan Pembangunan dan Smart City)

RPJMD Kabupaten Maros 2021 merupakan rencana induk pembangunan daerah yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi dari keenam dimensi smart city harus bernaung pada program dan kegiatan yang dirancang di RPJMD. Selain itu, renstra OPD di Kabupaten Maros juga menjadi ujung tombak dalam teknis pelaksanaan smart city.



Gambar I - 10 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD

Pada tahap akhir dari implementasi masterplan smart city, terdapat empat diferensiasi dalam pelaksanaan rencana aksi. Pertama, rencana aksi kebijakan, rencana aksi ini terkait regulasi atau dasar hukum yang diperlukan dalam upaya implementasi smart city. Yang kedua, terkait rencana aksi infrastruktur yang mencanangkan sarana dan prasarana fisik yang perlu dibangun atau dikembangkan pada proses pengembangan smart city. Ketiga, rencana aksi aplikasi, yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur digital seperti web, aplikasi, atau sistem lainnya untuk mendukung program kota cerdas. Rencana aksi yang terakhir, yaitu literasi. Rencana aksi ini menjadi bagian vital dalam pengembangan smart city. Sebaik apapun inisiasi dan inovasi yang ada, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat hal tersebut belum menjadi kebijakan yang membangun dan akhirnya program akan mati suri. Dengan demikian, imbauan pada masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengembangan smart city.

BAB II. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Smart city pada dasarnya adalah sebuah pendekatan baru dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam pengembangan smart city, berbagai inovasi dimunculkan untuk mewarnai program dan kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi berbagai program dan kegiatan pembangunan tersebut. Nilai tambah bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain peningkatan produktivitas, akuntabilitas, transparansi, kemudahan, kecepatan, luasan cakupan, dan sebagainya.

Karena smart city lebih merupakan pendekatan baru dan bukan mendefinisikan program-program baru, maka seyogyanya arah pembangunan smart city juga didasarkan pada arah pembangunan daerah. Kesamaan arah ini penting agar implementasi smart city dapat selaras dengan pembangunan daerah, sehingga tujuan memberikan dampak nilai tambah dapat diwujudkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, perumusan visi, misi, dan sasaran smart city sebagai landasan pengembangan smart city perlu dikaitkan dengan visi misi pembangunan daerah.

Mengaitkan visi, misi, dan sasaran smart city dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah akan memastikan koherensi keduanya. Dari visi, misi, dan sasaran yang selaras, selanjutnya akan dapat ditentukan inovasi-inovasi terhadap berbagai program pembangunan secara selaras pula. Penetapan arah pembangunan smart city untuk Kabupaten Maros inilah yang akan dijelaskan dalam Bab II ini.

Pada Bab II ini akan diuraikan tentang arah pembangunan smart city Kabupaten Maros. Subbab II.1 menjelaskan tentang visi, misi, dan sasaran smart city sebagai titik tolak pembangunan smart city, dan Subbab II.2 mendeskripsikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan smart city di Kabupaten Maros.

II.1. Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Kabupaten Maros

II.1.1. Visi dan Misi Smart City

Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan yang merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Seperti tercantum dalam Bab V RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026, visi Pemerintah Kabupaten Maros 2021-2026 adalah:

“Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing”

Kata “sejahtera” memiliki makna bahwa masyarakat Maros dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan.

“Religius” memiliki makna terciptanya kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.

Sementara itu kata “berdaya saing” berarti terwujudnya kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global pada masa yang akan datang yang meliputi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi.

Berdasarkan visi Kabupaten Maros maka disusunlah visi smart city Kabupaten Maros, yaitu:

“Menuju Kabupaten Maros yang Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing dengan Kecerdasan yang Harmonis”

Visi smart city Kabupaten Maros diturunkan langsung dari visi Kabupaten Maros. Visi ini menjelaskan cara pencapaian visi Kabupaten Maros. Frasa “kecerdasan yang harmonis” yang menjadi ciri smart city disematkan kepada visi daerah. Kata “kecerdasan” merupakan padanan kata “smart”, dan kata “harmonis” menjelaskan suatu bentuk hubungan yang ideal yang terjadi antara banyak aspek. Secara implisit, kata “harmonis” juga mengandung pandangan yang menyeluruh (holistik) terhadap semua aspek yang terkait. Bila kedua frasa tersebut digabung, “kecerdasan yang harmonis” menggambarkan kondisi yang dicirikan dengan sifat cerdas, yang di dalamnya terkandung banyak aspek yang diikat dalam relasi-relasi yang ideal dan menyeluruh. Kondisi seperti inilah yang akan diwujudkan dalam rangka

menjalankan pembangunan daerah di Kabupaten Maros, untuk mewujudkan visi dan tujuannya.

Bila didalami lebih jauh, kata “kecerdasan” dalam visi smart city Kabupaten Maros, mencerminkan kehendak untuk mencapai kondisi yang lebih baik melalui cara-cara baru yang kreatif, inovatif, dan memberikan nilai tambah yang nyata. Kecerdasan adalah sebuah atribut yang sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi (TIK) yang menjadi penciri masa depan. Tidak heran bila kata “smart” dalam smart city sering diasosiasikan dengan pemanfaatan TIK dalam pembangunan. Pandangan ini tidak keliru, namun menganggap kecerdasan adalah produk teknologi tidaklah tepat. Kecerdasan lebih merupakan hasil dari proses kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Kecerdasan lebih terkait dengan ide atau gagasan, dan dapat diterapkan pada berbagai hal (metode, cara, teknik, ataupun tool atau perangkat yang digunakan). Karena berada pada level ide/gagasan, maka sebenarnya kecerdasan dapat tetap muncul meskipun tanpa adanya keterlibatan teknologi (TIK). Ketika TIK hadir, maka perannya adalah sebagai akselerator bagi implementasi ide atau gagasan baru tersebut. TIK memberikan kecepatan, ketepatan, kemudahan, keluasan cakupan, dan berbagai kelebihan lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mewujudkan “kecerdasan”.

Kata “harmonis” menunjukkan adanya keselarasan yang terjadi ketika berbagai elemen saling berinteraksi. Dalam konteks smart city, keselarasan dibangun di dalam enam dimensi smart city yang menunjukkan keragaman fokus dan perhatian terhadap proses-proses pembangunan yang dijalankan (intra-dimension), dan dicoba diwujudkan juga antar dimensi (extra-dimension). Dengan cirinya masing-masing yang heterogen, keenam dimensi ini perlu dipandang dalam sebuah kerangka yang komprehensif dan holistik. Komprehensivitas dan keutuhan pandangan ini diperlukan untuk relasi antar elemen/dimensi yang harmonis. Tanpa pandangan yang utuh, persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk membentuk relasi yang harmonis tidak akan dapat diidentifikasi dengan baik. Pada akhirnya harmoni atau keselarasan adalah prasyarat untuk membangun semua aspek smart city secara bersama dan tetap mempertahankan keseimbangan. Dalam banyak kasus, harmoni atau keselarasan ini menjadi strategi pembangunan smart city dengan peluang keberhasilan yang paling tinggi.

Pada akhirnya frasa “kecerdasan yang harmonis” dalam visi smart city Kabupaten Maros dapat dipahami sebagai pendekatan inovatif yang didorong oleh pemanfaatan teknologi (TIK) dalam proses-proses pembangunan yang dijalankan secara harmonis.

Adapun misi smart city Kabupaten Maros disusun berdasarkan visi smart city. Misi smart city menjelaskan secara mendasar bagaimana visi tersebut dicapai. Misi smart city Kabupaten Maros juga diselaraskan dengan misi Kabupaten Maros (tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros 2023-2026). Rumusan kedua misi ini ditampilkan dalam Tabel II-1.

Tabel II - 1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Maros dan misi smart city Kabupaten Maros

Isu Strategis Daerah	Misi Kabupaten Maros RPJMD 2021-2026	Misi Smart City Kabupaten Maros	Dimensi Smart City
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Digitalisasi penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Smart Governance
Indeks Pembangunan Manusia Daerah yang Masih Perlu Ditingkatkan	2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan kompetensi dan literasi SDM dalam menyongsong era informasi	Smart Society
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Belum Maksimal	3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif	Memperluas pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar melalui pemanfaatan teknologi	Smart Living
Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Ekonomi Daerah	4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal melalui cara-cara inovatif	Smart Branding, Smart Economy & Smart Society
Belum meratanya pembangunan infrastruktur daerah	5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif secara merata	Smart Economy & Smart Living

Angka IKLH yang masih dapat ditingkatkan dan RTRW	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan literasi	Smart Environment & Smart Living
---	---	---	----------------------------------

II.1.2. Sasaran Smart City Kabupaten Maros

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembangunan, maka ditetapkanlah sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan adalah kondisi-kondisi yang ingin dicapai melalui program-program pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks smart city, sasaran-sasaran smart city dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensi dan sub-dimensi smart city.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembangunan smart city pada dasarnya bertujuan menguatkan dan mengakselerasi pembangunan daerah, sehingga ketika menetapkan sasaran-sasarannya, perlu diperhatikan keselarasan antara sasaran-sasaran smart city dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyelarasan ini dicapai dengan melakukan pemetaan antara sasaran-sasaran pembangunan daerah ke dalam dimensi-dimensi smart city, pemetaan ini akan menghasilkan relasi yang jelas antara sasaran-sasaran pembangunan daerah dengan sasaran-sasaran smart city. Relasi yang tegas inilah yang akan menjamin program-program smart city berada dalam koridor program yang digariskan di dalam RPJMD.

Tabel II - 2 Sasaran Smart City Kabupaten Maros dan Keterkaitannya Dengan RPJMD

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD
Smart Governance	Layanan Publik	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Sasaran-sasaran ini sesuai dan mendukung tercapainya Tujuan ke-1 RPJMD Kab Maros 2021-2026
	Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Perancangan Kebijakan	Terimplementasinya regulasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik yang baik	
Smart Branding	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	RPJMD Kab Maros tidak menyebutkan secara eksplisit sasaran-sasaran yang terkait promosi dan pemasaran, namun semuanya mengarah pada peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumber daya daerah (Tujuan ke-4).
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	
	Wajah (Tampilan) Kota	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Dalam RPJMD Kab Maros 2021-2026, sasaran sektor ekonomi tidak dibahas secara terinci, namun semua disatukan dalam kerangka ekonomi berbasis keunggulan sumber daya daerah (Tujuan ke-4). Nilai tambah yang diperoleh kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
	Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya jumlah pengangguran	
		Terkendalinya laju inflasi	
		Menurunnya jumlah masyarakat miskin	
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Masalah tata ruang terkait dengan fungsinya sebagai penunjang aktifitas ekonomi masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-5 RPJMD Kab Maros) dan pemenuhan standar pelayanan minimum bagi masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-3)
		Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	
	Kesehatan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Sesuai dengan Tujuan ke-2, terkait dengan kualitas SDM
	Transportasi	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Dalam RPJMD Kab Maros, masalah transportasi dipandang sebagai elemen penting untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-3)
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Semua aspek dalam Smart Society mengarah pada Tujuan ke-2 RPJMD Kab Maros yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	
	Ekosistem Belajar dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	
	Keamanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Sesuai dengan Tujuan ke-6 RPJMD Kab Maros
		Menurunnya resiko bencana	Sesuai dengan Tujuan ke-7 RPJMD Kab Maros
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Sesuai dengan Tujuan ke-6 RPJMD Kab Maros
	Tata Kelola Energi	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat (khususnya dalam hal energi)	Sesuai dengan Tujuan ke-3 RPJMD Kab Maros

II.2 Indikator Utama Smart City Kabupaten Maros

Indikator-indikator utama smart city Kabupaten Maros diturunkan dari indikator-indikator pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPD. Usulan indikator-indikator smart city ditampilkan pada Tabel II-4.

Tabel II - 3 Indikator-indikator utama smart city Kabupaten Maros

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
Smart Governance	Layanan Publik	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat; Nilai SAKIP; Indeks SPBE	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk
	Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	Perancangan Kebijakan	Terimplementasinya regulasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik yang baik		6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
Smart Branding	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB		9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
				pendapatan sumber sendiri
	Wajah (Tampilan) Kota	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat		10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
	Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
		Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	
	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan		
Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri 9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
		Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (terkait dengan pelayanan minimum masyarakat)	
	Kesehatan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks kesehatan	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks harga konsumen	15.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk 6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
				dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	Ekosistem Belajar dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks pendidikan	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa
	Keamanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat kriminalitas/ gangguan keamanan dan ketertiban umum	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan 6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas air; Indeks kualitas lahan	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota
		Menurunnya resiko bencana	Indeks ancaman bencana	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas air; Indeks kualitas lahan	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota
	Tata Kelola Energi	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat (khususnya dalam hal energi)	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan minimum)	7.1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu. 7.4. Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi

BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Pembangunan smart city adalah sebuah upaya yang memiliki lingkup luas dan berdurasi lama. Visi, tujuan, dan sasaran smart city yang telah dijelaskan pada Bab II menjadi landasan untuk menyusun program dan kegiatan smart city di Kabupaten Maros, namun sebelumnya perlu dirumuskan terlebih dahulu strategi pembangunan yang akan dijalankan. Strategi ini akan menentukan bagaimana visi dan tujuan smart city akan dicapai melalui pilihan-pilihan arah, fokus, dan penekanan terhadap sektor-sektor yang akan dikembangkan, metode yang dipilih, dan jenis-jenis kegiatan yang akan dijalankan.

Basis penentuan strategi pembangunan smart city adalah kondisi riil Kabupaten Maros. Secara lebih spesifik, strategi smart city dapat diturunkan dari analisis kondisi saat ini dan analisis SWOT, yang di dalamnya sudah termuat strategi-strategi spesifik terkait dengan faktor-faktor SWOT yang teridentifikasi. Strategi SWOT pada masing-masing dimensi smart city kemudian disarikan untuk dirumuskan menjadi strategi umum yang digunakan sebagai platform dalam merancang program dan kegiatan smart city nantinya.

III.1 Strategi Smart Governance

Strategi untuk Smart Governance dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: layanan publik, manajemen birokrasi, dan kebijakan publik. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Governance tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 1 Arahan Strategi untuk Smart Governance

Sub dimensi	Arahan Strategi
Pelayanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
Manajemen Birokrasi	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen birokrasi yang lebih efektif
Efisiensi kebijakan publik	Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien

III.2 Strategi Smart Branding

Strategi untuk Smart Branding dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: ekosistem pariwisata, daya saing bisnis daerah, dan wajah kota. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Branding tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 2 Arahan Strategi untuk Smart Branding

Sub dimensi	Arahan Strategi
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat
Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif
Wajah Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang

III.3. Strategi Smart Economy

Strategi untuk Smart Economy dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: daya saing industri (lokal), kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Economy tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 3 Arahan Strategi untuk Smart Economy

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Daya Saing industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakit
Kesejahteraan	Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar

	Menciptakan gerakan mencintai produk local untuk peningkatan konsumsi produk lokal
Transaksi keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai

III.4. Strategi Smart Living

Strategi untuk Smart Living dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: harmonisasi tata ruang, layanan kesehatan, dan layanan transportasi. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Living tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 4 Arahan Strategi untuk Smart Living

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Tata ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penanganan Kawasan tidak layak huni
Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik

III.5. Strategi Smart Society

Strategi untuk Smart Society dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: interaksi masyarakat, layanan pendidikan, dan keamanan masyarakat. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Society tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini:

Tabel III - 5 Arahan Strategi untuk Smart Society

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Interaksi sosial	Revitalisasi kearifan local masyarakat untuk pengembangan interkasi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa
Learning	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah
Keamanan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)

III.6. Strstegi Smart Environment

Strategi untuk Smart Environment dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: proteksi lingkungan, tatakelola limbah dan sampah, dan tatakelola energi. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Environment tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif di masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 6 Arahan Strategi untuk Smart Environment

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Proteksi lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder
Pengelolaan sampah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis msasyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder
Energi terbarukan	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder

BAB IV. RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN MAROS

Implementasi smart city merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah di era modern dengan cara modern yang lebih inovatif. Hal ini diharapkan mampu membantu berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Terdapat tiga tujuan utama dalam pengembangan Smart City di daerah. Pertama, Smart City adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola kehidupan masyarakat di perkotaan. Kedua, konsep Smart City mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya yang efektif dan efisien. Ketiga, Smart City diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Dalam menentukan rencana aksi, susunan ini disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kota cerdas. Segala kebijakan, aktivitas, tujuan, hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait kebutuhan dalam penyelenggaraan program dan inovasi yang akan dilakukan. Rencana aksi Smart City memiliki 4 (empat) aspek Rencana, yaitu :

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan Smart City;
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City;
3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City;
4. Rencana penguatan literasi Smart City.

IV.1. Rencana Aksi Smart Governance

Tabel IV - 1 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi		MAROS SMART VILLAGE	Jangka Panjang	Menyiapkan regulasi terkait Penyediaan akses internet desa gratis, menyiapkan data desa lokasi	2025	Tower ,Radio wireless,Akses Point dan Fiber Optik	2027	bandwith	2026	Melakukan Bimbingan terhadap tenaga pengelola internet (pendampingan)	2026

Tabel IV - 2 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi Smart BPHTB (dapat diakses bukan hanya di laptop melainkan juga dapat diakses pada smartphone android dan IOS sehingga masyarakat dapat mengupload data-data yang dibutuhkan dan dapat mengetahui perjalanan berkas hingga terbit SPPD BPHTB)	Jangka Menengah	Peraturan Bupati	2023	Jaringan, Server, Komputer, dan Tenaga Pengolah Data	2024	Data dan Aplikasi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		2. SISMIOP	Jangka Menengah	Peraturan Bupati	2023	Jaringan, Server, dan Komputer	2024	Data dan Aplikasi Berbasis WEB	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		3. Pengembangan Sistem informasi Data	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan, Server, dan Komputer	2024	Data dan Aplikasi Berbasis WEB	2024	Melakukan Bimbingan terhadap tenaga pengelola data	2023
		KLINIK DESA "Pemberian Layanan kepada Pemerintah Desa yang memerlukan Bimbingan terkait Administrasi Pemerintah Desa melalui tenaga terlatih"	Jangka Menengah	Memformalkan dengan menetapkan KLINIK DESA sebagai Inovasi Layanan Daerah Untuk Pemerintah di Desa	2023	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik (Kursi, Meja, Komputer, Papan Tulis, ATK, AC)	2023	Aplikasi Layanan On Line, Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Program BPJS Desa Mandiri	Jangka Menengah	Memformalkan dengan menetapkan Program BPJS desa Mandiri sebagai Inovasi Layanan Daerah Untuk Aparat Pemerintah Desa	2023	Layanan BPJS Kesehatan, Kartu Anggota Kepesertaan	2023	Aplikasi BPJS Kesehatan	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		TAKE " Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take) Kabupaten Maros "	Jangka Menengah	Memformalkan dengan menetapkan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai Inovasi Layanan Daerah Untuk Pemerintah di Desa dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	2023	Laptop, Komputer	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		TAKERDES "Tanggap Kerja sama dan Penataan antar Desa"	Jangka Menengah	Menyiapkan Regulasi Kerja sama dan Penataan Desa, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja sama	2022	Laptop, Komputer	2023	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Desa, tanggal 21 April 2022							
		INDEK'S (Informasi Data Kependudukan Maros) Layanan Akses Elemen Data Agregat kependudukan berbasis Web on line	Jangka Menengah	Peraturan Bupati	2023	Jaringan, Server, Komputer, dan Tenaga Pengolah Data	2025	Data dan Aplikasi Berbasis WEB	2026	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025
		Membentuk Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)	Jangka Menengah	Menyiapkan regulasi terkait Desa Cantik	2023	Tenaga pengolah dan kompilasi data	2023	-	-	Melakukan Bimbingan terhadap tenaga pengelola statistik	2023
		Web desa mandiri	Jangka Menengah	Menyiapkan regulasi terkait website desa mandiri	2023	Tenaga pengelola web,jaringan dan instalasi internet desa	2023, 2024	aplikasi terkait pemerintahan desa	2023, 2024	melakukan bimbingan terhadap tenaga pengelolah website	2023
		Inovasi: Jemput Bola ,Dimana pelayanan dilakukan di tempat masyarakat yang membutuhkan pelayanan,dengan cara kerja sama dengan Puskesmas, RSUD, KUA, Discapil, DPMPSTPK untuk menerbitkan dokumen yang dibutuhkan	Jangka Menengah	Regulasi Tentang Pelayanan Publik yang berbasis On Line dan Jemput Bola di kecamatan	2023	Jaringan, Laptop	2023	Data dan Aplikasi Berbasis WEB	2023	Melakukan Sosialisasi,Bi mbingan Teknis dan Pelatihan Tentang Pelayanan Publik	2023
Manajemen Birokrasi yang efisien	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen	SI DATA SERU	Jangka Menengah	Menyiapkan regulasi terkait SI DATA SERU	2023	Tenaga IT	2023	Server dan aplikasi	2023	Melakukan Bimbingan teknis	2023
		BERHIAS (Berkas Lengkap Sehari Tuntas) aplikasi khusus pemanfaatan Data NIK melalui MOU pemanfaatan data yg	Jangka Menengah	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2024	Jaringan, Server, Komputer, dan	2025	Data dan Aplikasi	2025	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	birokrasi yang lebih efektif	diperuntukkan khusus lembaga dan instansi Non Vertikal.				Tenaga Pengolah Data					
		Replikasi Aplikasi dalam bentuk Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (Layanan-layanan Kepegawaian) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) sehingga ASN mudah mengakses segala jenis data-data ASN dari semua OPD, seperti cuti, KGB, kenaikan Pangkat, data Diklat atau Bimtek melalui updating data secara berkala dari tiap OPD	Jangka Menengah	Penyusunan regulasi terkait layanan administrasi kepegawaian dan e-SKP	2023	Replikasi dan pengembangan aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (simASN) yang diintegrasikan dengan siASN (aplikasi BKN) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP)	2023	Aplikasi Si ASN dan e-SKP	2023	Pelatihan dan sosialisasi bagi ASN, Kasubag dan atau pelaksana subbagian Kepegawaian OPD	2023
		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS)	Jangka Menengah	Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan Pelaksanaan Audit Berbasis Elektornik	2023	Pengembangan hardware, software dan kelengkapan pendukung Ruang Data Center (core switch, core router, server virtualisasi, firewall, converter, load balancing, dll)	2023	Aplikasi terintegritas mulai penganggaran dan akuntabilitas kinerja terintegrasi, e-perencanaan, e-sakip, SIPD, LPSE, siskeudes, eAudit,	2023	Pelatihan penggunaan aplikasi	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Penyusunan Database Barang Milik Daerah yang terintegrasi dengan SKPD Lain	Jangka Menengah	Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2023	PC/Laptop	2023	Data dan Aplikasi	2023	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2023
Efisiensi Kebijakan Publik	Memfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Pembangunan Aplikasi e-counseling	Jangka Menengah	Penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan Konsultasi Online tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan	2023	Pengembangan berbasis web	2023	Aplikasi konsultasi online	2023	Pelatihan penggunaan aplikasi	2023

Tabel IV - 3 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Governance

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi SIMDA berbasis WEB agar terkoneksi dengan SKPD lain	Jangka Pendek	Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menyiapkan semua regulasi yang berhubungan dengan penatausahaan BMD	2023	SERVER DAN ROUTER	2023	APLIKASI DAN WEB yang terkoneksi dengan PD Lain	2023	Keterampilan SDM dalam mengoperasikan perangkat Aplikasi SIMDA	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Melakukan upgrade pada Aplikasi SIMPEL khususnya pada pengambilan Nomor antrian secara online	Jangka Pendek	MOU	2022	Jaringan,Laptop	2023	Server Tambahan	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Melakukan sosialisasi SOS ke tingkat kecamatan dan kelurahan	Jangka Pendek	MOU, SK Kepala Dinas	2022	-	-	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Nama: SIPUTRI (Sistem Jemput Dokumen Perizinan) Sasaran Ke Masyarakat di desa terpencil. Sistem pelayanan penjemputan dokumen perizinan ke desa terpencil yang lakukan secara terjadwal	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan SIPUTRI sebagai Inovasi Pelayanan Perizinan di Daerah	2023	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik (Mobil Pelayanan, Laptop, printer dll)	2023	Jaringan internet dan aplikasi OSS	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		OM DUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan) Layanan berbasis Covid-19, Antar Jemput Berkas permohonan dan dokumen adminduk. (Berbasis Online)	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan INOVASI OM DUK sebagai Inovasi Daerah, serta MOU pemberdayaan Ojek Lokal.	2023	Pemberdayaan petugas khusus dan Sarana transportasi	2023	Aplikasi Layanan On Line	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		TANDU (Tanggap Dukcapil) Layanan responsif terhadap permintaan perekaman KTP-el bagi penduduk sulit akses, disabilitas dan yang terkena dampak bencana alam/sosial. PAKINTAKI (Pelayanan Administrasi Kependudukan terintegrasi keliling) di Kecamatan, Desa dan kelurahan.	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan INOVASI TANDU sebagai Inovasi Daerah	2023	Sarana transportasi dan Perlengkapan Perekaman	2023	Aplikasi Layanan On Line	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		API (Aplikasi Pencari Issue)	Quick Win	Regulasi terkait perbup	2023	Programmer/IT Consultant	2023	Softwere sesuai dibutuhkan	2023	Sosialisasi antar OPD	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		E-Spot (Penyediaan Titik Hotspot gratis di Desa)	Quick Win	Menyiapkan regulasi terkait Penyediaan akses internet desa gratis, menyiapkan data desa lokasi	2023	Tower ,Radio wireless,Akses Point dan Fiber Optik	2023, 2024, 2025	-	2023, 2024 dan 2025	Melakukan Bimbingan Terhadap tenaga pengelolah internet	2023
Manajemen Birokrasi yang efisien	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen birokrasi yang lebih efektif	Investigasi Kebakaran bersama Investigator Kepolisian terkait Penyebab Kejadian Kebakaran	Jangka Pendek	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terkait Investigasi Penyebab Kebakaran	2023	Laboratorium, ATK PC, Print dan Smartphone	2023	Website Damkar dan Aplikasi SI PADAM	2023	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemadam Kebakaran terkait Investigator	2023
		Operasi Gabungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tim SAR dalam Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jangka Pendek	MOU Perangkat Daerah dan Tim SAR	2023	ATK , Print dan Smartphone	2022	Website dan Media Sosial Pemadam Kebakaran	2023	Pelatihan Bersama/APel Gelar Pasukan menghadapi Bencana	2023
		Pengembangan kompetensi SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jangka Pendek	Penyusunan Standar Operasional Prosedur mekanisme penjualan dan penghapusan aset tetap	2023	Gedung penyimpanan aset yang Rusak	2023	Aplikasi SIMDA berbasis WEB yang terkoneksi dengan PD Lain	2023	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2023
		Kemudahan ASN memeriksa data kepegawaiannya melalui aplikasi	Jangka Pendek	Regulasi terkait profil data ASN	2023	Pengembangan aplikasi simASN	2023	Aplikasi simASN	2023	Sosialisasi dan updating data ASN	2023
		Kemudahan memperoleh informasi terkait ASN yang telah mengikuti Diklat atau Bimtek	Jangka Pendek	SK Bupati	2023	-	-	Pengembangan aplikasi simASN	2024	Sosialisasi dan updating data ASN	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		melalui updating data secara berkala dari tiap OPD									
		Program Penyidik Teladan (Peningkatan Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS))	Jangka Pendek	SK Bupati Tentang Pembentukan Panitia Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2022	Ruang Sekretariat PPNS, Komputer/Laptop dan Printer	2024	Dokumen SK dalam Bentuk (Pdf, Word, Excel)	2023	Bimtek SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2023
		Tanda tangan elektronik	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi terkait Penerapan Tanda tangan elektronik (Perbup)	2023	Jaringan internet stabil	2023	Aplikasi persuratan	2024	Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik, implementasi tanda tangan elektronik	2024, 2025, 2026
		Sistem Aduan dari Dapil	Jangka Pendek	Perbup/Perda	2023	Website, Laptop, Komputer	2023	Aplikasi Pengaduan Aspirasi Masyarakat	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
Efisiensi Kebijakan Publik	Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jangka Pendek	Membuat SK dan diregulasikan dalam bentuk Perbud, kemudian diperdakan	2023	-	-	Dokumen, Data, dan Sistem Input-Output	2023	Bimbingan Teknis	2024
		Membuat website BKPSDM untuk media komunikasi sebagai bentuk pelayanan (termasuk keterbukaan dalam menjalankan assessment centre)	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi assesment center melalui Perbup	2023	Mengaktifkan kembali website BKPSDM	2023	Website BKPSDM	2023	Bimbingan IT	2023
		Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan pada pembahasan kebijakan anggaran	Jangka Pendek	Membuat SK dan diregulasikan dalam bentuk Perbud, kemudian diperdakan	2022	-	-	Dokumen, Data, dan Sistem Input-Output	2023	Bimbingan Teknis	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Aplikasi terintegrasi dengan e-TPP dan e-SKP	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi e-TPP dan e-SKP melalui Perbup	2023	Menyiapkan Aplikasi	2023	Replika Aplikasi e-TPP dan e-SKP	2023	Sosialisasi dan Bimbingan Penginputan	2023

IV.2. Rencana Aksi Smart Branding

Tabel IV - 4 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi		Big Data Tourism	Jangka Panjang	Perbup, SK Bupati, MOU, dan POKJA	2025	Data Center Room Setiap Kecamatan	2029	Software Aplikasi/jaringan Internet	2025	Publikasi Media Sosial	2026

Tabel IV - 5 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Bimbingan pembuatan paket wisata dan wisata tematik	Jangka Menengah	SK Bupati dan KAJIAN KELITBANGAN	2024	Pembangunan desa tematik	2025	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Program	2024
		Penguatan Kelembagaan Desa wisata melalui jejaring desa wisata khusus Kab. Maros	Jangka Menengah	SK BUPATI dan Kelembagaan Desa Wisata	2025	Kantor Sekretariat	2027	-	-	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Program	2026
Membangun Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan	Melaksanakan penyusunan IPRO	Jangka Menengah	MOU, SK Kepala Dinas, Perda	2022	-	-	Dokumen dan kontel digital	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	pengembangan iklim investasi yang kondusif	Pembuatan Aplikasi Informasi Investasi di Kabupaten Maros	Jangka Menengah	Menyiapkan Regulasi terkait Aplikasi informasi Investasi Kabupaten Maros	2023	Sarana dan Prasarana pembuatan Aplikasi	2023	Server dan Web	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
Penataan Wajah Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	Digitalisasi potensi lokal daerah,yaitu bentuk promosi potensi lokal daerah,baik pariwisata,ekonomi kreatif melalui portal resmi pemerintah daerah	Jangka Menengah	menyusun regulasi terkait hak cipta konten promosi utnuk menghindari suplikasi konten oleh pihak tak bertanggung jawab	2023, 2024, 2025	Peralatan dokumentasi,pe ralatan studio,editing,t enaga design grafis,editing dan jurnalistik	2023, 2024	jaringan internet dan aplikasi	2023, 2024	Pelatihan terkait dokumentasi, jurnalistik desing grafis,editin g dan jurnalistik	2023, 2024

Tabel IV - 6 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Pembuatan Ruang Publik Literasi Ekonomi kreatif	Jangka Pendek	Perbup dan SITEPLAN	2023	Pembangunan Sarana Prasaran Ruang Publik	2024	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023
		Sport Tourism	Jangka Pendek	SK Bupati dan Pembentukan Tim Pelaksana	2023-2024	Sarana Prasarana kebutuhan dan keamana sport tourism	2023-2024	Konten Digital	2023	Sosialisasi Sosial Media	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Membangun Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif	Melakukan Promosi Peta Potensi ke media Sosial	Jangka Pendek	MOU, SK Kepala Dinas	2022	-	-	Software Aplikasi/jaringan Internet, Aplikasi GIS	2023	Sosialisasi Sosial Media	2023
		Membuat Aplikasi Pelaporan Online Data Perusahaan	Jangka Pendek	MOU	2022	Jaringan Internet, Laptop/PC	2023	Website	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
Penataan Wajah Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	Maros Excotic Place	Quick Win	SK Bupati dan Pembentukan Tim Pelaksana	2022	Jaringan Internet, Laptop/PC	2022	Website	2022	Publikasi dan Sosialisasi Program	2022

IV.3. Rencana Aksi Smart Economy

Tabel IV - 7 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi		Penyediaan Rumah Kemas dan Pusat Layanan KUMKM Terpadu	Jangka Panjang	Surat Perjanjian/Kontrak antara OPD dengan Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa, SK Bupati terkait tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Perbup terkait Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Kemas dan Pusat Layanan KUMKM Terpadu	2023-2027	UPTD, Mesin Pencetak Kemas, Laptop/PC, Bahan Baku/Material Cetak	2023-2027	Aplikasi Desain	2023-2027	Bimtek terkait teknik pembuatan desain kemas	2023-2027

Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar</p> <p>2. Menciptakan gerakan mencintai produk local untuk peningkatan konsumsi produk lokal</p>	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan lokal	Jangka Panjang	SK Kepala Dinas	2023	Lahan dan Prasarana	2023	-	2023	Sosialisasi Tentang Lumbung Pangan Lokal	2023
--------------------------	---	---	----------------	-----------------	------	---------------------	------	---	------	--	------

Tabel IV - 8 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakait	Menginisiasi pembentukan koperasi modern /koperasi online (di dalamnya ada Toko Online Koperasi, Layanan Online Koperasi, Layanan Laporan Keuangan Online Terintegrasi, Layanan Anggota Terintegrasi, Layanan Komunitas Koperasi, Layanan RAT Online)	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas, Dokumen Pengesahan Kelembagaan Koperasi, dan PKS	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2026	Aplikasi dan Web Koperasi Digital	2027	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2024
		Membuat database koperasi berbasis web untuk memudahkan Perangkat Daerah untuk melakukan monev koperasi	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas dan MOU	2024	Jaringan Internet dan Laptop	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2025	Sosialisasi kepada pelaku usaha	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Membuat satu Aplikasi (e-SATU) yang di dalamnya memuat semua layanan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, antara lain: 1. database koperasi, UMKM, pedagang, dan IKM, 2. monitoring dan evaluasi; 3. Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting, 4. Peta Layanan Tera-Tera Ulang alat UTTP, 5. Layanan Registrasi Pelayanan Pendaftaran Usaha/Nomor Induk Koperasi/NIB	Jangka Menengah	Menyusun SK Tim IT Aplikasi dengan melibatkan pihak terkait	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Pengembangan hardware, software dan kelengkapan pendukung Ruang Data Center (core switch, core router, server virtualisasi, firewall, converter, load balancing, dll)	2023	pelatihan penggunaan aplikasi	2023
		1. Aplikasi e-catalog produk olahan hasil perikanan, 2. Aplikasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan ikan	Jangka Menengah	SK Bupati Penggunaan E-Catalog dan Daftar Usaha	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi	2023	Aplikasi Pengembang Aplikasi E-Catalog, Aplikasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha	2023, 2024	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Berkala Digital dan Non-Digital	2023, 2024, 2025
		Membuat master plan potensi industri unggulan masing-masing kecamatan melalui aplikasi web yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku IKM dan Masyarakat	Jangka Menengah	Surat Perjanjian/Kontrak antara OPD dengan Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa, SK Bupati terkait tentang Penunjukan	2023-2027	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi	2023-2027	Aplikasi Pendukung	2023-2027	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2025

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK							
		Pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha dalam bentuk aplikasi SMART UMKM	Jangka Menengah	Peraturan Bupati, MOU	2024-2026	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2025	Aplikasi SMART UMKM	2025	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2024
		Pembangunan Sentra Industri Gula Aren dengan sistem koperasi	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas dan Dokumen Pengesahan Kelembagaan Koperasi	2025	Gedung Koperasi dan Fasilitas Kelembagaan	2027	Sistem Informasi dan Pendataan Kelembagaan	2025	Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Koperasi	2024
Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar 2. Menciptakan gerakan mencintai	Penyediaan Aplikasi/ Informasi Harga dan Aplikasi Berbasis MAP akses Pangan	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas	2024	Jaringan Internet dan Laptop	2024	Website Dinas Pertanian	2024	Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Aplikasi	2024
		Aplikasi Saprodi Budidaya, termasuk informasi jadwal panen dan harga	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas	2024	Jaringan Internet dan Laptop	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2025	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Penyediaan Aplikasi Kerawanan Pangan Berbasis SIG	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas	2024	Jaringan Internet dan Laptop	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2025	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	produk local untuk peningkatan konsumsi produk lokal	Penyediaan Aplikasi LP2B Berbasis SIG (sistem informasi geografis)	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas	2026	Jaringan Internet dan Laptop	2025	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2026	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024

Tabel IV - 9 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakit	Melakukan pameran produk export, produk IKM, produk UMKM melalui media sosial/ media virtual	Jangka Pendek	SK Kepala Daerah, MOU dengan Penyelenggara, menyiapkan regulasi	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Akun dengan pengaruh tinggi dan desain produk yang menarik	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		terkelolanya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha secara online	Jangka Pendek	SK Kepala DIinas	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi secara virtual atau melalui e-money	Jangka Pendek	MOU antara Pemerintah Daerah dengan Bank penerima setoran PAD	2023	Aplikasi, card e-money, mesin pembayaran digital	2023	Sistem Pembayaran dan Pendataan berbasis web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi agar lebih produktif dan kreatif dalam melakukan diversifikasi produk, perluasan pemasaran secara online, dan kemasan yang up-to-date, dsb	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas dan MOU	2023	-	-	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan koperasi khususnya KSP/USP melalui kerja sama dengan lembaga penjamin simpanan bagi anggota koperasi agar dapat terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi usaha	Jangka Pendek	MOU dengan LPS	2023	-	-	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Peningkatan layanan tera/tera ulang dengan membuat aplikasi khusus metrologi legal untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan jasa layanan tera/tera ulang, misalnya pada saat mengajukan permohonan tera/tera ulang bisa melalui aplikasi dan tidak harus ke kantor, dan langsung direspon oleh Penera	Jangka Pendek	Peraturan Bupati	2024	Alat Penera	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024
		Aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2024	Aplikasi, data dan konten	2024	Sosialisasi Layanan dan Pelatihan	2024
		(UMKM Naik Kelas) membantu UMKM dalam peningkatan skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi berbasis IT/Aplikasi/Web	Jangka Pendek	SK Bupati, MOU	2024	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2024	Aplikasi, data dan konten	2024	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha UMKM	2024

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Aplikasi informasi jadwal panen dan harga dan aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	Membuat SK dan MOU dengan pihak terkait	2023	laboratorium perikanan dan IT	2023 s/d 2024	pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan pihak terkait	2023 s/d 2024	Melakukan Bimtek untuk meningkatkan SDM di bidang IT terutama untuk penggunaan Aplikasi	2023 s/d 2024
		SETORAN DUKUN (Aplikasi Sistem Terpadu Monitoring Produksi, dan Pemasaran Produk Unggulan)	QuickWin	Peraturan dan SK Bupati	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2023	Pelatihan dan Sosialisasi kepada instansi di Maros untuk melakukan input data terpusat	2023
Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar	penyediaan aplikasi sistem pelaporan dsetiap desa terkait Serangan Organisme pengganggu tumbuhan dan produksi Tanaman serta penyediaan bahan kimia untuk penanganannya	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2024	Jaringan Internet dan Laptop, bahan kimia untuk penanganan serangan OPT	2024	Website Dinas Pertanian	2024	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian dan Bimtek Pengelolaan Aplikasi	2024
	2. Menciptakan gerakan mencintai produk local untuk	Penggunaan teknologi pembantutan (pengkerdilan) untuk peningkatan produksi budidaya tambak	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC	2023	Data dan Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	peningkatan konsumsi produk lokal	Penyediaan Data Hasil Pekarangan Pangan Lestari Melalui Aplikasi	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, dan Server	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Pembentukan Tim Tanggap Penyakit Hewan Menular	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas, Pembentukan Pokja	2023	Kantor Sekretariat	2025	-	-	Bimtek dan pendampingan kepada anggota tim	2024
		Mendorong perbup terkait pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jangka Pendek	Peraturan Bupati	2024	Kantor Sekretariat	2025	-	-	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi kepada Petani	2024
		Penyediaan aplikasi Nelayan Pintar	Jangka Pendek	Kerjasama dengan pihak terkait	2023	Jaringan internet dan laptop	2023	website potensi perikanan	2023	bimtek terkait penggunaan aplikasi	2023
Ekosistem Transaksi Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai	Penyediaan aplikasi data statistik produksi hasil nelayan	Jangka Pendek	Kerjasama dengan pihak terkait	2023	Jaringan internet dan laptop	2023	website potensi perikanan	2023	bimtek penggunaan aplikasi	2023
		Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan parkir secara virtual atau melalui e-money	Jangka Pendek	MoU dengan pihak terkait	2023	Kartu e money	2023	aplikasi cek saldo e money	2023	sosialisasi pembayaran retribusi parkir melalui e money	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Bantuan Modal Kerja untuk UKM Produktif	Jangka Pendek	SK Bupati terkait Calon Penerima Bantuan Modal Kerja dan Persyaratan Calon Penerima	2024	-	-	Data dan Standardisasi	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

IV.4. Rencana Aksi Smart Living

Tabel IV - 10 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi		Maros Telemedicine (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat miskin difasilitas Kesehatan)	Jangka Panjang	Perlu adanya Perbup dan Perjanjian Kerjasama dengan Provider / Pihak ketiga	2022	Jaringan Instalasi, Data Center, SDM bidang IT Kesehatan	2022, 2023	<p>Aplikasi masih pengembangan yakni HISP, SmartPSC agar bisa menjadi aplikasi telemedicine mutakhir. HISP (Health Information System Programme) adalah Aplikasi yang dibuat dalam merekam data Cakupan Layanan yang terkait 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan, Kedepan akan di Kembangkan sebagai Aplikasi Satu Data Terintegrasi</p> <p>Telekonsultasi, Aplikasi Telemedicine</p> <p>SiKERen (Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi)</p> <p>Smart PSC adalah sistem pelayanan gawat darurat dan kebencanaan dengan dukungan teknologi informasi melalui “call center” – “dispatching” – “ambulance/police/disaster/fire-fighter operation management”. Sistem ini mendukung layanan kegawatdaruratan baik medis maupun non medis, termasuk kecelakaan, darurat sakit, kriminalitas, keamanan, bencana alam, kebakaran dan situasi kegawatan lain kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan cara menghubungi Call Centre lewat emergency button, emergency number, WA dan channel lain.</p>	2022	Melakukan Sosialisasi berupa Media Sosial, Media elektronik dsb, serta peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk Diklat	2023

Tabel IV - 11 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik	Aplikasi penyedia informasi terkait moda transportasi berupa halte, terminal serta rest area	Jangka Menengah	SK Bupati yang Memuat Peta Jalan	2023	Pengembangan Perangkat dan Sistem Pemantauan CCTV berupa ATCS; Pengembangan CCTV Analytic (Pemantauan Jumlah, Kecepatan, Kepadatan kendaraan di suatu ruas); Adanya Papan Informasi Tentang Informasi Penataan Ruang; Pengembangan Aplikasi Data Infrastruktur Jalan Berbasis GIS	2021	Aplikasi, server	2021	Melakukan Sosialisasi Tentang Aplikasi	2023

Tabel IV - 12 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penanganan Kawasan tidak layak huni	Aplikasi penyedia informasi terkait persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan melalui aplikasi SIMBG dan SIPETARUNG	Jangka Pendek	Peraturan Bupati No 43 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Mamminasata Kecamatan Moncongloe 2021-2041	2021	Adanya Papan Informasi Tentang Informasi Penataan Ruang	2021	APLIKASI SIMBG dan APLIKASI GIS PETARUNG	2021	Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang	2022

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros	Aplikasi SIMRS, Sisirut, Vclaim, Sirsoline Kemenkes (Ketersediaan Informasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang telah berizin)	Jangka Pendek	Perlu Adanya perjanjian kerja sama dengan Provider/Pihak Ketiga	2023	SDM Bidang IT Kesehatan	2023	SIMRS Khanza Bridging dengan BPJS	2024	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Online ke Masyarakat	2022
		Aplikasi SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit) Terintegrasi dengan sistem .BPJS	Jangka Pendek	SK Direktur RS	2023	Alat-alat kesehatan dengan kualitas lebih baik	2024	-	-	-	-
		E-Rekam Medik	Quick Win	SK Direktur RS	2022	Internet, Komputer, Penyimpanan Data	2022	SIMRS dengan Data Rekam Medik yang bisa diakses melalui login pasien	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2022
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik	Aplikasi Sistem Informasi PJU	Quick Win	Surat Edaran Bupati Terkait penggunaan hemat energi dan pengeluaran kadar emisi seperti CO2	2023	Pengembangan Sistem Informasi PJU (Smart Street Lighting) meliputi Lokasi PJU, Komsumsi Daya Listrik Serta Kerusakan-Kerusakan lainnya	2024	Aplikasi, server	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

IV.5. Rencana Aksi Smart Society

Tabel IV - 13 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi		Peningkatan Pembinaan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Jangka Panjang	Peraturan Daerah dan Lembaga Pembinaan & Pelatihan	2025	Kantor Sekretariat dan Gedung Pelatihan	2028	Data dan Website terpadu	2027	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelayanan	2026
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Penggunaan robot untuk maping wilayah terdampak dan menghitung rasio kerugian	Jangka Panjang	SK Bupati	2025	Ruang Kontrol, Perangkat Keras Robotik, dan SDM Operator Robotik	2028	Data, Sensor, Sistem Robotik	2028	Pelatihan, Transfer Teknologi, dan Uji Coba	2027
		Penggunaan teknologi untuk mencari dan mengevakuasi korban serta penyaluran logistik	Jangka Panjang	SK Bupati	2025	Ruang Kontrol, Perangkat Keras Robotik, dan SDM Operator Robotik	2028	Data, Sensor, Sistem Robotik	2028	Pelatihan, Transfer Teknologi, dan Uji Coba	2027

Tabel IV - 14 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan local masyarakat untuk pengembangan interkasi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Transformasi Edukasi dan Informasi layanan bagi anak dan remaja yang berbasis Inklusi	Jangka Menengah	Menyusun Proposal/KAK	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran	2023	Website Dinas	2023	Edukasi dan Informasi terkait Kesehatan Reproduksi bagi Remaja, Pencegahan Perkawinan Usia anak, dan Kampanye yang diadakan di sekolah	2023
		Pengelolaan dan Pengembangan data dengan sistem Citra Satelit	Jangka Menengah	1. SK Kadis Tentang Pembentukan TIM Pelaksanaa Pelayanan 2. Menyusun MOU dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2022	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran (Laptop , Gedung)	2023	Website Dinas Sosial	2022 - 2023	Bimtek Pengelolaan data pada Citra Satelit	2023
Membangun Ekosistem Edukasi	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Program Sekolah Penggerak/Smart School (jangka panjang)	Jangka Menengah	1. MoU antara Kemedikbud Ristek dengan Pemerintah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, 2. Surat Edaran Terkait Penyelenggaraan	2022	1. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, 2. Penyediaan Peralatan/Media Pendidikan berbasis TIK,	2023	1. Website Satuan Pendidikan, Website Dinas	2022-2023	1. Sosialisasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, 2. Booklet Sekolah Penggerak, 3. Penyediaan Buku/Bahan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun								
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
				Program Sekolah Penggerak, 3. Peraturan Bupati Mengenai Penyelenggaraan Sekolah Penggerak		3. Penguatan Kompetensi Pendidik yang berbasis TIK, 4. Penguatan Akses Jaringan Internat pada Satuan Pendidikan, 5. Penguatan Jaringan Listrik, 6. Penyediaan Sarana Sanitasi Sekolah					Bacaan dan Perpustakaan bagi Satuan Pendidikan	
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Aplikasi Pencari Kerja Online (Seperti Sistem Linked In khusus di Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan perusahaan atau lembaga pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan)	Jangka Menengah	Peraturan Bupati, PKS dengan perusahaan dan lembaga terkait, payung hukum pelindung pencari kerja	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2025	Data, Aplikasi, dan Web	2026	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025	
		Melakukan Operasi Yustisi/Non Yustisi bersama Instansi/Lembaga Terkait (TNI/POLRI, Dishub, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dalam penegakan Perda dan Perkada (SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN / TIPIRING)	Jangka Menengah	Perjanjian Kerja Sama dalam penegakan Perda dan Perkada (SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN / TIPIRING)	2022	Pejabat Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Komputer/Laptop dan Printer	2023	Dokumen Elektronik (Pdf. Word Excel)	2023	Rapat Tentang Tugas Masing Masing Tim Operasi Yustisi dan Apel Gelar Pasukan	2023	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Desa Tangguh Bencana	Jangka Menengah	SK Bupati	2024	Sarana prasarana desa tangguh bencana	2024	Konten Digital dan Sistem Informasi Kebencanaaa	2025	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelayanan	2024
		Big Data Kebencanaan	Jangka Menengah	PERDA dan SK Bupati tentang teknis pusat data	2023	Lokasi/ Ruang data, Server, perangkat mobile	2025	Teknik manajemen, Sistem keamanan, Jaringan internet	2025	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025
		sistem informasi bencana via smartphone : berupa alarm peringatan dini sebelum terjadi bencana	Jangka Menengah	PERDA dan SK Bupati tentang sistem informasi penanggulangan bencana	2023	Perangkat mobile, Server, Jaringan internet	2024	Aplikasi alarm	2024	Sosialisasi kepada masyarakat	2024
		WARGA SIAGA BRASTA DAHANA (peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini dan melakukan pemadaman awal kebakaran) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) Desa/Kelurahan (Kecamatan Bantimurung Desa Mangaloreng dan Alatengae)	Jangka Menengah	Pembentukan Relawan Kebakaran (REDKAR) Tingkat RT/RW, Desa Kelurahan dan Kecamatan dan Pembentukan Tim HUMAS Damkar yang mengelola adsense Media Sosial Pemadam Kebakaran	2022	Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (APAR, Baju Safety dan Motor Damkar) untuk Redkar, Komputer, Printer dan Smartphone	2023	Website Damkar, Media Sosial dan Aplikasi SI PADAM	2023	Bimtek SDM Relawan Kebakaran	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Pemasangan sensor-sensor yang mampu mendeteksi potensi bencana: banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan longsor	Jangka Menengah	SK TIM dari Bupati	2023	Peralatan sensor dan konektivitas jaringan	2023	Aplikasi untuk pemantau potensi bencana	2023	Mengedukasi masyarakat yang bermukim di lokasi pemasangan sensor	2023

Tabel IV - 15 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan local mayarakat untuk pengembangan interkasi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Pengembangan Fitur Aplikasi Siola Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pembahas pada Kegiatan Sosialisasi	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023
		Uji Kompetensi Bagi Kader Perempuan Partai Politik	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pembahas pada Kegiatan Sosialisasi	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Sistem layanan aduan dan penanganan PPKS terpadu	Jangka Pendek	1. SK Tentang Pembentukan Sistem Layanan aduan dan penanganan PPKS terpadu, 2. Pembentukan Aplikasi terkait Layanan Pengaduan Penanganan PPKS	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasarana	2023	Sistem Pelayanan Berbasis Web dan Laporan Digital Lainnya	2023	Sosialisasi terkait Layanan aduan dan Pelayanan PPKS	2023
		Membuat Aplikasi Sistem Pendaftaran dan Pengaduan terkait Aduan dan pendaftaran Ormas	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas terkait Layanan terintegrasi	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasarana	2023	Sistem Pelayanan Berbasis Web dan Laporan Digital Lainnya	2023	Sosialisasi terkait Layanan aduan dan Pelayanan Ormas	2023
		Transformasi Layanan pengaduan korban kekerasan berbasis Inklusi	Quick Win	Menyusun MOU dengan Jejaring Layanan	2022	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasarana	2023	Pembuatan aplikasi/Jaringan terkait Layanan Pengaduan terintegrasi, Website Dinas, Website UPTD P2TP2A	2023	Sosialisasi terkait Layanan terintegrasi pengaduan kasus korban kekerasan bagi perempuan	2023
Membangun Ekosistem Edukasi	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Nonformal/Lembaga Kursus (English Camp)	Jangka Pendek	1. Mou Antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Kursus	2023	1. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung,	2023	Konten Digital	2023	1. Sosialisasi Kegiatan English Camp,	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Layanan Perpustakaan Elektronik merupakan inovasi layanan buku elektronik di perpustakaan daerah	Quick Win	1. SK Kadis tentang Pengelola Layanan Perpustakaan Elektronik; 2. SOP Layanan Perpustakaan Elektronik	2022	1. SDM berlatar pendidikan teknologi informasi; 2. Koleksi buku digital; 3. Komputer/laptop	2022/2023, dst	Jaringan internet (server web) dan intranet (server lokal)	2022/2023, dst	1. Sosialisasi layanan perpustakaan elektronik; 2. Mendampingi pemustaka dalam mengaplikasikan perpustakaan elektronik	2022/2023, dst
		Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan inovasi layanan untuk masyarakat berkegiatan di perpustakaan daerah	Quick Win	2. SK Kadis tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; 2. SOP Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	2022	1. Ruang pertemuan, ruang komputer, ruang belajar, ruang berlatih keterampilan kerja	2022/2023/2024, dst	Jaringan internet	2022/2023, dst	1. Sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; 2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (lembaga swasta/ormas/lembaga pemerintah) untuk bantuan penganggaran (membiayai kegiatan masyarakat di perpustakaan daerah)	2022/2023/2024, dst
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Penyampaian materi sosialisasi informasi rawan bencana melalui beberapa saluran : channel youtube, kunjungan ke sekolah-sekolah dan POSYANDU	Jangka Pendek	SK TIM dari Kepala OPD	2023	Alat peraga untuk sosialisasi	2023	Konten video untuk diunggah ke channel youtube	2023	-	-

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Sistem peringatan dini cuaca buruk di laut secara mobile (Menggunakan Speed Boat yang sudah dimiliki)	Jangka Pendek	Sertifikasi kompetensi untuk mengoperasikan sistem peringatan dini dan peralatannya (termasuk Speed Boat)	2023	Peralatan pendukung untuk pemantauan cuaca buruk	2024	Aplikasi dan konektivitas jaringan	2024	-	-
		Pengelolaan Adense Media Sosial Pemadam Kebakaran melalui HUMAS DAMKAR	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	-	-	Akun dan Konten Digital Sosial Media	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Dokumen Data Standar Kelayakan Alat Proteksi Kebakaran (Pasif/Aktif) Bangunan/Gedung/lingkungan Terintegrasi Melalui melalui Sistem Website/Aplikasi Smartphone	Jangka Pendek	Aplikasi E-Proteksi Kebakaran (Playstore/Appstore)	2023	ATK dan Sticker Pemeriksaan PC, Print dan Smartphone	2023	Website Damkar dan Aplikasi SI PADAM	2023	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemadam Kebakaran (Inspektur dan Penyuluh)	2023
		Pembuatan E- Book Wawasan Kebangsaan yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bimtek	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Pelatihan Tim Pelaksana	2023
		Pembentukan Kader Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pelaksana dan Pembahas Kegiatan Pelaksanaan Monitoring,	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2022	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik Sosial							
		Call Center Kebencanaan	Jangka Pendek	SK Bupati	2023	Server, Jaringan internet, Ruang Call Center	2023	Jaringan Call Center	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Ransel darurat di setiap rumah/ gedung pemerintahan	Jangka Pendek	PERDA	2025	-	2025	-	-	Sosialisasi dan Pelatihan Program	2023
		Pengadaan penampungan/ tangki air bersih untuk mengatasi kekeringan dengan skema kerjasama (MoU) bersama stake holder di Kab. Maros.	Jangka Pendek	PERBUP terkait dengan kerjasama dengan pihak swasta	2025	-	-	-	-	Memberikan pemahaman kepada perusahaan yang akan diajak kerjasama	2023
		PUSDALO (Pusat Pengendalian Data dan Operasi)	Quick Win	Perbup	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, dan Server	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2023	Sosialisasi dan Pelatihan Program	2023
		Kurikulum pelatihan dan mitigasi bencana melalui kelas online atau akun influencer	Quick Win	PERDA dan SK Bupati tentang penambahan materi pelatihan dan mitigasi bencana ke dalam kurikulum	2023	Perangkat mobile, Jaringan internet	2024	Aplikasi Kelas Online dan Aplikasi Sosial Media	2023	Membangun budaya sadar bencana	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		'Paras Manis' ini yaitu Polisi Pamong Praja Siap Melayani dan Mengayomi masyarakat dengan Humanis yang bernuansa Hak Asasi Manusia" untuk menurunkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP hanya tukang gusur pasar, Razia dan Arogan.	Quick Win	SK Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Satpol-PP	2022	Kendaraan Mobil Dalmas dan Kendaraan Roda Dua Komputer/Lap top dan Printer	2023	Website Satpol PP dan Media Sosial Dokumen Elektronik (Pdf. Word Excel)	2023	Melakukan Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Satpol-PP dan Apel Gelar Pasukan	2023

IV.6. Rencana Aksi Smart Environment

Tabel IV - 16 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Environment		Ubah Sampah Menjadi Emas	Jangka Panjang	SK Bupati	2026	Lokasi dan alat pengolahan sampah	2028	Materi Pembelajaran dan Platform Penjualan Barang Olahan	2029	Melakukan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tentang Pengolahan Sampah Daur Ulang	2027

Tabel IV - 17 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	Database terkait Penyusunan dokumen lingkungan hidup dapat dikelola berbasis online.	Jangka Menengah	PERGUB, PERDA,	2023	Jaringan dan Laptop	2024	Dokumen Daring	2024	Sosialisasi Layanan dan Penguatan Dokumen Lingkungan Hidup	2023
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis msyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Aplikasi pelaporan terkait kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta aduan pengelolaan sampah dan memantau secara online kualitas lingkungan serta kondisi persampahan Kabupaten Maros	Jangka Menengah	Perbup	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2026	Data, Aplikasi, Website	2027	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Pengembangan kampung iklim di setiap Desa/ Kelurahan	Jangka Menengah	SK dari Bupati untuk penunjukan dan penetapan lokasi program kampung iklim daan sekolah adiwiyata	2023	- Kendaraan	2023	Aplikasi	2024	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan kampung iklim da sekolah adiwiyata	2023
		Pengembangan sekolah Adiwiyata di setiap kecamatan				- Laptop					
Tata Kelola Energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Listrik Tenaga Surya	Jangka Menengah	Perda, Perbup, PKS	2025	Infrastruktur Pendukung, Sarana, Prasarana Listrik Tenaga Surya	2028	Sistem Pengaturan Energi Surya	2027	Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan, dan Pengawasan	2027

Tabel IV - 18 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	sistem layanan pengaduan terkait lingkungan hidup secara online	Jangka Pendek	Perbup	2023	Jaringan dan Laptop	2023	Sistem Aduan Berbasis web	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Tim pengolahan sampah bekerja dan beroperasi secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengeolahan sampah	Jangka Pendek	SK Bupati untuk pembentukan Tim Pengawasan	2023	- Kendaraan operasional	2024	-	-	Pelatihan dan Pendampingan Tim	2023
		Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan				Sistem Berbasis Web	2023	Aplikasi	2023	Sosialisasi tentang sistem pelaporan	2023
		BERLIN (Bersih Lingkungan)	Quick Win	SK dari Bupati untuk pengelola bank sampah	2023	- Bangunan untuk kantor bank sampah - Konektifitas Jaringan inernet	2023	Aplikasi	2024	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah	2023
Tata Kelola Energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Kampung Hijau Energi	Jangka Pendek	SK Bupati	2023	Sensor Cahaya Lampu Otomatis dan Perlengkapan Ramah Lingkungan	2024	Sistem Operasi Terpadu Ramah energi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Sistem layanan pengaduan terkait lingkungan hidup secara online	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan, Server, dan Komputer	2023	Data dan Aplikasi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024

BAB V. PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Road map atau peta jalan pembangunan Smart City Kabupaten Maros dimulai dari program quick win (1 tahun) yang menjadi batu pijakan dalam pembangunan Smart City, kemudian dilanjutkan oleh inovasi lainnya sehingga membentuk kesatuan inovasi jangka panjang. Pembangunan Smart City Kabupaten Maros dilanjutkan berdasarkan roadmap jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun). Asumsi pembangunan smart city di Kabupaten Maros bersifat multi-step settlement untuk mendukung program panjang dengan skala besar di belakangnya.

Berdasarkan susunan visi, misi, program, dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026, maka road map pembangunan smart city yang dijabarkan dalam master plan ini sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, smart city mampu menjadi akselerator dalam percepatan pembangunan daerah di era modern.

V.1. Peta Jalan Smart Governance

Smart Governance merupakan dimensi pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Dimensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen birokrasi yang lebih efisien, serta kualitas kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan. Melalui dimensi ini, smart city menginginkan adanya perubahan pada konsep dan kebiasaan pemerintah selaku regulator daerah dalam melaksanakan tata pemerintahannya. Peta jalan pengembangan smart governance jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 1 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Governance	Program Aplikasi dan Informatika	Indeks SPBE	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	"Maros Smart Village"	Jangka Panjang	3,00	Rp500.000.000	3,25	Rp500.000.000	3,25	Rp250.000.000	3,50	Rp250.000.000	4,00	Rp100.000.000	APBD	Dinas Kominfo-SP	
						2028		2029		2030		2031		2032				Sumber Dana
						04.00	Rp100.000.000	04.00	Rp100.000.000	04.25	Rp90.000.000	04.25	Rp90.000.000	04.25	Rp81.000.000	APBD	Dinas Kominfo-SP	

Tabel V - 2 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Governance Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Program Pengelolaan dan Pengendalian PBB/BPHTB / Penerbitan SPPT PBB dan BPHTB	Persentase masyarakat yang mengurus SPPT administrasi perpajakan	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Aplikasi Smart BPHTB (dapat diakses bukan hanya di laptop melainkan juga dapat diakses pada smartphone android dan IOS sehingga masyarakat dapat mengupload data-data yang dibutuhkan dan dapat mengetahui perjalanan berkas hingga terbit SPPD BPHTB)	Jangka Menengah	95%	Rp691.622.500	100%	Rp691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	-	APBD	Bapenda
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	PAD	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SISMIOP	Jangka Menengah	95%	Rp691.622.500	100%	691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	-	APBD	BAPENDA
				6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Sistem informasi Data	Jangka Menengah	95%	Rp691.622.500	100%	691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	-	APBD	BAPENDA

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA / Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintah Desa sesuai UU yang berlaku	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Klinik DESA	Jangka Menengah	80 Desa	Rp815.000.000	80 Desa	Rp1.045.000.000	80 Desa	Rp815.000.000	80 Desa	Rp815.000.000	80 Desa	Rp1.150.000.000	APBD	Dinas PMD
				7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Program BPJS Desa Mandiri	Jangka Menengah											ALOKASI DANA DESA (ADD)	DESA
				5.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	"TAKE " Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take) Kabupaten Maros "	Jangka Menengah											Alokasi Dana Desa	Dinas PMD, Desa, Kelurahan dan Kecamatan, BKAD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA / Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	9.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	TAKERDES (Tanggap Kerja Sama Antar Desa)	Jangka Menengah	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	DAU	Dinas PMD
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan DataBase Kependudukan Untuk Pemanfaatan Data	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	INDEKS (Informasi Data Kependudukan Maros) Layanan Akses Elemen Data Agregat kependudukan dan Profil Kependudukan berbasis Web online	Jangka Menengah	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp35.000.000	DAU	DISDUKCAPIL
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Desa yang dapat menyajikan data wilayah desa /desa yang menyediakan data standar	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Membentuk Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), Pencatatan atau data RW/Dusun setiap sektor ada di desa dan dilakukan oleh aparat desa itu sendiri.	Jangka Menengah	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	APBD/ADD Desa	Dinas Koinfo - SP
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	Web Desa Mandiri (Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan	Jangka Menengah	50 %	Rp25.000.000	60 %	Rp25.000.000	70 %	Rp25.000.000	80 %	Rp25.000.000	90 %	Rp25.000.000	APBD/ADD Desa	Dinas Koinfo - SP dan DPMD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			informasi dan media massa	diminta secara daring	pemerintahan di desa melalui : 1.Website Desa (Mengundang individu dan kelompok informasi masyarakat yang ada di desa untuk mendengarkan hasil capaian program kegiatan yang telah dihasilkan oleh pemerintah serta rencana strategis yang akan dilaksanakan ke depan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat desa) 2.Pemasangan videotron aoutdoor di balai desa atau titik lokasi stragetis lainnya).													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Inovasi: Jemput Bola .Dimana pelayanan dilakukan di tempat masyarakat yang membutuhkan pelayanan,dengan cara kerja sama dengan Puskesmas,RSUD,KUA,D iscapil,DPMPTSPK untuk menerbitkan dokumen yang dibutuhkan.	Jangka Menengah	90%	Rp1.730.000.000	95%	Rp1.730.000.000	100%	Rp1.730.000.000	100%	Rp1.730.000.000	100%	Rp1.730.000.000	APBD dan ADD Desa	KECAMATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen birokrasi yang lebih efektif	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi data sektoral yang terintegrasi	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Menyediakan informasi data sektoral terintegrasi melalui sistem data sektoral terpadu (SI DATA SERU)	Jangka Menengah	1 Aplikasi	Rp50.000.000	1 aplikasi	Rp25.000.000	APBD	Dinas Kominfo-SP						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD Mendapat-kan HAK AKSES dalam pemanfaatan Data NIK	1.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	BERHIAS (Berkas Lengkap Sehari Tuntas) aplikasi khusus pemanfaatan Data NIK melalui MOU pemanfaatan data yg diperuntukkan khusus lembaga dan instansi Non Vertikal.	Jangka Menengah	8 OPD	Rp60.000.000	10 OPD	Rp150.000.000	12 OPD	Rp160.000.000	15 OPD	Rp180.000.000	20 OPD	Rp200.000.000	DAK/DAU	DISDUKCAPIL
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelola-nya Sistem Informasi Kepegawai-an	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Replikasi Aplikasi dalam bentuk Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (Layanan-layanan Kepegawaian) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) sehingga ASN mudah mengakses segala jenis data-data ASN dari semua OPD, seperti cuti, KGB, kenaikan Pangkat, data Diklat atau Bimtek melalui updating data	Jangka Menengah	100 %	Rp95.309.500	100 %	Rp112.195.000	100 %	Rp117.195.000	100 %	Rp122.195.000	100 %	Rp135.000.000	DAU	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					secara berkala dari tiap OPD													
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Pemerintah Kinerja Daerah	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Aplikasi sistem informasi pengawasan (SIMWAS)	Jangka Menengah	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	APBD	Inspekto-rat
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemandangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang telah terverifikasi Indikator ini langsung tertuju kepada penilaian WTP	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan Database Barang Milik Daerah yang terintegrasi dengan SKPD Lain	Jangka Menengah	100 %	Rp62.699.700	100 %	Rp65.834.685	100 %	Rp69.126.419	100 %	Rp72.582.740	100 %	Rp76.211.877	APBD	BKAD
Efisiensi Kebijakan Publik	Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembangunan Aplikasi e-consuling	Jangka Menengah	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	APBD	Inspekto-rat

Tabel V - 3 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Governance Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH / Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi SIMDA berbasis WEB agar terkoneksi dengan SKPD lain	Jangka Pendek	3 Laporan	Rp75.810.000	3 Laporan	Rp79.600.500	DAU	BKAD
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Melakukan upgrade pada Aplikasi SIMPEL khususnya pada pengambilan Nomor antrian secara online	Jangka Pendek	26 Izin	Rp385.000.000	26 Izin	Rp385.000.000	DAK	DPMPPTSP
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola dalam sistem informasi penanaman modal	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Melakukan sosialisasi penggunaan OSS ke tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga memudahkan bagi masyarakat terpencil dan melakukan registrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jangka Pendek	1 Jenis	Rp75.000.000	1 Jenis	Rp75.000.000	DAU	DPMPPTSP

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan indikator kegiatan : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Nama : SIPUTRI (Sistem Jemput Dokumen Perizinan) Sasaran Ke Masyarakat di desa terpencil Sistem pelayanan penjemputan dokumen perizinan ke desa terpencil yang lakukan secara terjadwal	Quick Win	26 Izin	350,000,000	26 Izin	Rp385.000.000	APBN	DPMPPTSP
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan Sistem Layanan Stelsel Aktif	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	OM DUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan) Layanan berbasis Covid-19, Antar Jemput Berkas permohonan dan dokumen adminduk. (Berbasis On Line)	Quick Win	97%	Rp40.000.000	97%	Rp50.000.000	DAU	DISDUKCAPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Layanan Stesel Aktif	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	TANDU (Tanggap Dukcapil) Layanan responsif terhadap permintaan perekaman KTP-el bagi penduduk sulit akses, disabilitas dan yang terkena dampak bencana alam/sosial.	Quick Win	98%	Rp40.000.000	98%	Rp50.000.000	DAU	DISDUKCAPIL

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	API (Aplikasi Pencari Issue)	Quick Win	100%	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	DAU	Bappelitbang-da
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah di seluruh desa	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	E-Spot (Penyediaan Titik Hotspot gratis di Desa)	Quick Win	Penyediaan Infrastruktur jaringan Seluruh Desa Di Kec.Tompobulu, Kec.Camba,Kec.Cenrana,Kec.Mallawa,Kec.Tanralili	Rp4.000.000.000	Penyediaan Infrastruktur Jaringan Seluruh Desa Di Kec.Moncongloe,Kec.Simbang,Kec.Bontoa,Kec.Bantimuring,Kec.Maros Baru	Rp4.000.000.000	investor	Dinas Kominfor-SP dan DPMD
Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen birokrasi yang lebih efektif	Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Investigasi Kebakaran bersama Investigator Kepolisian terkait Penyebab Kejadian Kebakaran	Jangka Pendek	1 Dokumen	Rp105.000.000	1 Dokumen	Rp108.000.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Pelaksanaan Reses).	Jumlah Aspirasi yang dihasilkan atau aspirasi yang selaras dengan perencanaan (RKPD)	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Sistem Aduan Dapil	Jangka Pendek	5.575 Aspirasi	Rp2.194.025.000	5.575 Aspirasi	Rp21.800.000.000	DAU	SEKRETARIA T DPRD
		Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Jenis Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Operasi Gabungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tim SAR dalam Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jangka Pendek	4 Jenis	Rp1.126.385.000	4 Jenis	Rp1.126.385.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar
		Pengelolaan Barang Milik Daerah / Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan kompetensi SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jangka Pendek	15 dokumen	Rp62.699.700	15 dokumen	Rp65.834.685	APBD	BKAD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen profil kepegawaian	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Kemudahan ASN memeriksa data kepegawaiannya melalui aplikasi SIM-ASN	Jangka Pendek	Jumlah pegawai yang sudah terdata di aplikasi	Rp53.695.000	1 Dokumen	Rp58.695.000	APBD	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Kemudahan memperoleh informasi terkait ASN yang telah mengikuti Diklat atau Bimtek melalui updating data secara berkala dari tiap OPD	Jangka Pendek	95%	Rp3.506.283.273	100%	Rp3.867.974.154	APBD	BKPSDM
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Perda dan Perkada	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Program Penyidik Teladan (Peningkatan Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS))	Jangka Pendek	1 Laporan	Rp187.500.000	1 Laporan	Rp201.000.000	APBD/DA U	Satpol-PP dan Damkar
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD layanan publik yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh OPD Layanan Publik, penggunaan Tanda Tangan elektronik untuk administrasi Kependudukan yang dapat diakses sampai	Jangka Pendek	3 OPD	Rp50.000.000	5 OPD	Rp100.000.000	APBD	Dinas Kominfo-SP

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					ke desa melalui internet gratis							
Efisiensi Kebijakan Publik	Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Fasilitasi Kegiatan Penyusunan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jangka Pendek	12 Layanan	Rp505.000.000	12 Layanan	Rp545.000.000	APBD	SEKRETARIA T DPRD
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Assessment Center (cara untuk mengetahui kompetensi diri seseorang sehingga dapat menemukan mana hal-hal yang harus dikembangkan olehnya)	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Membuat website BKPSDM untuk media komunikasi sebagai bentuk pelayanan (termasuk keterbukaan dalam menjalankan assessment centre)	Jangka Pendek	1700 ASN	Rp920.000.000	1500 ASN	Rp1.058.000.000	APBD	BKPSDM
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Pelayanan Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan pada pembahasan kebijakan anggaran	Jangka Pendek	10 Layanan	225,000,000	10 Layanan	250,000,000	APBD	SEKRETARIA T DPRD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi terintegrasi dengan e-TPP dan e-SKP	Jangka Pendek	2 Laporan	Rp174.135.000	1 Laporan	Rp62.000.000	APBD	BKPSDM

V.2. Peta Jalan Smart Branding

Citra kota di era modern menjadi isu yang sangat penting karena citra tersebut akan menjadi representasi dari daerah yang bersangkutan secara tidak langsung. Dimensi smart branding dibangun untuk meningkatkan citra dan nama besar daerah melalui potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dimensi ini akan membentuk bagaimana Kabupaten Maros akan dikenal dan dikenang melalui wisatawan yang datang berkunjung maupun melalui jagad maya. Peta jalan pengembangan smart branding jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 4 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Branding	Pemasaran pariwisata		Persentase Jumlah Kunjungan Pariwisata	10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Big Data Tourism	Jangka Panjang	650.000	Rp500.000.000	650.000	Rp500.000.000	650.000	Rp500.000.000	650.000	Rp500.000.000	650.000	Rp500.000.000	DAK dan DAU	DISPAR & DISKOP UMDA G
							2028		2029		2030		2031		2032			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
							700.000	Rp550.000.000	700.000	Rp550.000.000	700.000	Rp550.000.000	750.000	Rp625.000.000	750.000	Rp625.000.000	DAK dan DAU	DISPAR & DISKOP UMDA G

Tabel V - 5 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Branding Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parwisata	Rata rata lama kunjungan wisata	10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Bimbingan pembuatan paket wisata dan wisata tematik	Jangka Menengah	2 hari	Rp1.200.000.000	2 hari	Rp2.000.000.000	2 hari	Rp3.000.000.000	2 hari	Rp3.000.000.000	2 hari	Rp3.000.000.000	DAK, DAU	DISPARPORA & DISKOMINFO
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Penguatan Kelembagaan Desa wisata melalui jejaring desa wisata khusus Kab. Maros	Jangka Menengah	80 %	Rp1.200.000.000	80 %	Rp2.000.000.000	80 %	Rp3.000.000.000	80 %	Rp3.000.000.000	80 %	Rp3.000.000.000	DAK, DAU	DISPARPORA & PEMERINTAH KECAMATAN
Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor baik dari dalam maupun luar negeri yang menanamkan investasinya	1.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Melaksanakan penyusunan Kajian investment Project Ready to Offer (IPRO) , Dokumen mengenai data inverstasi	Jangka Menengah	130 Investor	Rp360.000.000	130 Investor	Rp360.000.000	130 Investor	Rp360.000.000	130 Investor	Rp360.000.000	130 Investor	Rp360.000.000	DAU	DPMPSTP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Investasi	1.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pembuatan Aplikasi Informasi Investasi di Kabupaten Maros	Jangka Menengah	12,06%	Rp136.000.000	12,06%	Rp177.500.000	12,06%	Rp215.000.000	12,06%	Rp215.000.000	12,06%	Rp215.000.000	DAU	DPMPSTP

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Media informasi yang menjadi media promosi wisata	10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Digitalisasi potensi lokal daerah, yaitu bentuk promosi potensi lokal daerah, baik pariwisata, ekonomi kreatif melalui portal resmi pemerintah daerah	Jangka Menengah	6 Media	Rp450.000.000	6 Media	Rp300.000.000	DAK, DAU	DISKOMINFO, DISPARPORA						

Tabel V - 6 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Branding Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pembuatan Ruang Publik Literasi Ekonomi kreatif	Jangka Pendek	80 %	Rp200.000.000	80 %	Rp300.000.000	DAK dan DAU	DISPARPORA & PEMERINTAH KECAMATAN
		Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif Lokal Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Sport Tourism	Jangka Pendek	80 %	Rp200.000.000	80 %	Rp300.000.000	DAK dan DAU	DISPARPORA & PEMERINTAH KECAMATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif	Pembuatan peta potensi inestasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha yang ada di Kab. Maros	1.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Melakukan Promosi potensi investasi pada Peta Potensi ke media Sosial	Jangka Pendek	1 Dokumen	Rp230.000.000	1 Kegiatan	Rp230.000.000	DAU	DPMPTSP
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara tepat waktu	5.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Membuat Aplikasi Pelaporan Online Data Perusahaan	Jangka Pendek	231 Perusahaan	Rp825.000.000	231 Perusahaan	Rp825.000.000	DAK	DPMPTSP
Wajah (Tampilan) Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Maros Excotic place Aplikasi	Quick Win	650.000 orang	Rp1.000.000.000	1.000.000 orang	Rp1.000.000.000	DAK	DISPARPORA

V.3. Peta Jalan Smart Economy

Smart economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang pintar sehingga dapat mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era digitalisasi yang disruptif. Dimensi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mampu mendukung kegiatan perekonomian masyarakat diimbangi dengan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah. Selanjutnya hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi ini dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan program peningkatan kemampuan dan pemberdayaan ekonomi yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, smart economy diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan melalui digitalisasi, memiliki akses terhadap permodalan, serta mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace*. Peta jalan pengembangan smart economy jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 7 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
							2023		2024		2025		2026		2027				
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Economy	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Penyediaan Rumah Kemas dan Pusat Layanan KUMKM Terpadu	Jangka Panjang	65%	Rp2.000.000.000	70%	Rp2.000.000.000	75%	Rp2.000.000.000	80%	Rp2.000.000.000	80%	Rp2.000.000.000	APBD	DISKOPUK M, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
						2028		2029		2030		2031		2032				Sumber Dana	Leading Sector
						82%	Rp2.200.000.000	82%	Rp2.200.000.000	85%	Rp2.200.000.000	85%	Rp2.410.000.000	87%	Rp2.410.000.000			APBD	DISKOPUK M, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Lumbung Pangan lokal	Jangka Panjang	-	-	10 Unit	Rp1.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
							2028		2029		2030		2031		2032		Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
							12 Unit	Rp1.100.000.000	12 Unit	Rp1.100.000.000	12 Unit	Rp1.100.000.000	15 Unit	Rp1.250.000.000	15 Unit	Rp1.250.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Menciptakan gerakan mencintai produk lokal untuk peningkatan konsumsi produk lokal																	

Tabel V - 8 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Economy Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Menginisiasi pembentukan koperasi modern /koperasi online (di dalamnya ada Toko Online Koperasi, Layanan Online Koperasi, Layanan Laporan Keuangan Online Terintegrasi, Layanan Anggota Terintegrasi, Layanan Komunitas Koperasi, Layanan RAT Online)	Jangka Menengah	2 Unit	Rp120.000.000	2 Unit	Rp120.000.000	2 Unit	Rp120.000.000	2 Unit	Rp120.000.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Kerjasama dengan stakeholder yang terakit	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam				2 Unit	Rp60.000.000	2 Unit	Rp60.000.000	2 Unit	Rp60.000.000	2 Unit	Rp60.000.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi berkualitas	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Membuat database koperasi berbasis web untuk memudahkan Perangkat Daerah untuk melakukan monev koperasi	Jangka Menengah	71,62%	Rp346.500.000	72,27%	Rp346.500.000	72,92%	Rp346.500.000	73,58%	Rp346.500.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi berkualitas (Sesuai dengan Permen KOPUKM No. 22 Tahun 2007)	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Membuat satu Aplikasi (e-SATU) yang di dalamnya memuat semua layanan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, antara lain: 1. database koperasi, UMKM, pedagang, dan IKM, 2. monitoring dan evaluasi; 3. Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting, 4. Peta Layanan Tera-Tera Ulang alat UTTP, 5. Layanan Registrasi Pelayanan Pendaftaran Usaha/Nomor Induk Koperasi/NIB. *) Layanan Pelaku Usaha pemilik alat UTTP yang berisi lokasi usaha (bentuk peta, dan menunjukkan titik lokasi), dan memuat informasi jenis usaha, jenis alat, jadwal tera/tera ulang, untuk memudahkan pengawasan	Jangka Menengah	66 Unit	Rp229.130.000	66 Unit	Rp229.130.000	66 Unit	Rp229.130.000	66 Unit	Rp229.130.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan				10 Unit Usaha	Rp100.000.000	15 Unit Usaha	Rp125.000.000	20 Unit Usaha	Rp125.000.000	25 Unit Usaha	Rp130.000.000	-	-	APBD	Dinas Perikanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil				100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi				243 Laporan (1 laporan perhari kerja)	Rp11.508.585.000	243 Laporan (1 laporan perhari kerja)	Rp11.508.585.000	243 Laporan (1 laporan perhari kerja)	Rp11.508.585.000	243 Laporan (1 laporan perhari kerja)	Rp93.870.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			dalam Sistem Informasi Perdagangan															
		Pengawasan/penyuluhan metrologi legal;	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Pelaku usaha yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)				88 orang pelaku usaha	Rp686.460.000	88 orang pelaku usaha	Rp686.460.000	88 orang pelaku usaha	Rp686.460.000	88 orang pelaku usaha	Rp569.978.900	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi yang tersedia dan dimanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI				1 Jenis	Rp30.500.000	1 Jenis	Rp33.000.000	1 Jenis	Rp36.000.000	3 Jenis	Rp190.000.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan manfaat atas pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan				33475 UMKM	Rp500.000.000	33475 UMKM	Rp500.000.000	33475 UMKM	Rp500.000.000	33475 UMKM	Rp500.000.000	-	-	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			potensi dan pengembangan usaha.															
		Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Aplikasi e-catalog produk olahan hasil perikanan, 2. Aplikasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan ikan	Jangka Menengah	1 Dok	Rp100.000.000	1 Dok	Rp125.000.000	1 Dok	Rp125.000.000	1 Dok	Rp130.000.000	-	-	APBD	Dinas Perikanan
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Pembangunan Sentra Industri Gula Aren dengan sistem koperasi	Jangka Menengah	95%	Rp17.502.000.000	100%	Rp17.502.000.000	100%	Rp17.502.000.000	100%	Rp17.502.000.000	100%	Rp17.502.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
		Penyusunan dan evaluasi rencana pembagunan industri kabupaten/kota.	Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Membuat master plan potensi industri unggulan di masing-masing kecamatan sesuai areal kawasan industri dalam RTRW melalui aplikasi web yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku IKM dan Masyarakat	Jangka Menengah	50 Ha	Rp2.320.605.000	50 Ha	Rp2.320.605.000	75 Ha	Rp2.320.605.000	75 Ha	Rp2.640.000.000	100 Ha	Rp2.640.000.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Aplikasi/ Informasi Harga dan Aplikasi Berbasis MAP akses Pangan	Jangka Menengah	1 Laporan (Harga 11 komoditi)	Rp90.000.000	1 Laporan (Harga 11 komoditi)	Rp90.000.000	1 Laporan (Harga 11 komoditi)	Rp90.000.000	1 Laporan (Harga 11 komoditi)	Rp90.000.000	-	-	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Menciptakan gerakan mencintai produk lokal untuk peningkatan konsumsi produk lokal	Pengelolaan pembudidaya ikan	jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Aplikasi Sapropdi Budidaya, termasuk informasi jadwal panen dan harga	Jangka Menengah	80 klp	Rp130.000.000	80 klp	Rp150.000.000	80 klp	Rp155.000.000	80 klp	Rp180.000.000	-	-	APBD	Dinas Perikanan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Aplikasi Kerawanan Pangan Berbasis SIG	Jangka Menengah	14 Kecamatan	Rp19.000.000	14 Kecamatan	Rp19.000.000	14 Kecamatan	Rp19.000.000	14 Kecamatan	Rp19.000.000	-	-	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Aplikasi LP2B Berbasis SIG (sistem informasi geografis)	Jangka Menengah	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp686.460.000	14 kecamatan	Rp686.460.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Ekosistem Transaksi Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penyediaan aplikasi data statistik produksi hasil nelayan	Jangka Menengah	180 orang	Rp145.000.0000	240 orang	Rp160.000.000	240 orang	Rp170.000.000	300 orang	Rp180.000.000	300 orang	Rp190.000.000	APBD, APBN	Dinas Perikanan

Tabel V - 9 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Economy Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakit	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Melakukan pameran melalui media sosial/media virtual	Jangka Pendek	10 Jenis	Rp2.081.093.900	10 Jenis	Rp2.081.093.900	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang memiliki izin PPLH yang berada dalam pengawasan pemerintah Kabupaten	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Terkelolanya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha secara online	Jangka Pendek	30	Rp200.000.000	30	Rp200.000.000	APBD	DPKPLH
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	5.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi secara non tunai dengan e-money	Jangka Pendek	25 Unit	Rp10.510.500	25 Unit	Rp10.510.500	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengurus Koperasi agar dapat bekerja lebih produktif dan kreatif dalam melakukan diversifikasi produk, perluasan pemasaran, dan kemasan yang up-to-date, dsb	Jangka Pendek	100 orang	Rp346.500.000	100 orang	Rp346.500.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan koperasi khususnya KSP/USP melalui kerja sama dengan lembaga penjamin simpanan bagi anggota koperasi agar dapat terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi usaha	Jangka Pendek	50 unit	Rp75.000.000	50 unit	Rp75.000.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Peningkatan layanan tera/tera ulang dengan membuat aplikasi khusus metrologi legal untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan jasa layanan tera/tera ulang, misalnya pada saat mengajukan permohonan tera/tera ulang bisa melalui aplikasi dan tidak harus ke kantor, dan langsung direpson oleh Penera	Jangka Pendek	943 Unit Alat UTTP	Rp686.460.000	943 Unit Alat UTTP	Rp686.460.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	32 Unit Usaha	Rp100.000.000	32 Unit Usaha	Rp125.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	(UMKM Naik Kelas) membantu UMKM dalam peningkatan skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi berbasis IT/Aplikasi/Web	Jangka Pendek	150 Unit UMKM	Rp500.000.000	150 Unit UMKM	Rp500.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Aplikasi informasi jadwal panen dan harga dan aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	0,97%	Rp725.000.000	0,97%	Rp950.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan manfaat atas pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	SETORAN DUKUN (Aplikasi Sistem Terpadu Monitoring Produksi, dan Pemasaran Produk Unggulan)	Quick Win	33.475 Unit	Rp225.000.000	33.475 Unit	Rp225.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar	Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani Akibat Gagal Panen	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Penyediaan aplikasi sistem pelaporan di setiap desa terkait Serangan Organisme pengganggu tumbuhan dan produksi Tanaman	Jangka Pendek	100	Rp350.000.000	100	Rp350.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	2. Menciptakan gerakan mencintai produk lokal untuk peningkatan konsumsi produk lokal	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penggunaan teknologi pembantuan (pengkerdilan) untuk peningkatan produksi budidaya tambak	Jangka Pendek	20 klp	Rp2.670.000.000	25 klp	Rp3.175.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Data Hasil Pekarangan Pangan Lestari Melalui Aplikasi	Jangka Pendek	14 KWT	Rp978.860.000	14 KWT	Rp1.038.860.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pembentukan Tim Tanggap Penyakit Hewan Menular	Jangka Pendek	14 Kecamatan	Rp550.750.000	14 Kecamatan	Rp550.750.000	APBD	Dinas Kesehatan
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Mendorong perbup terkait pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jangka Pendek	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan alam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Aplikasi Nelayan Pintar	Jangka pendek	3400 ton	Rp1.720.000.000	3600 ton	Rp1.725.000.000	APBD	Dinas Perikanan
Ekosistem Transaksi Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya	5.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan parkir secara virtual atau melalui e-money	Jangka Pendek	1 Unit	Rp90.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Bantuan Modal Kerja untuk UKM Produktif baik dalam bentuk modal usaha maupun pelatihan keterampilan kerja	Jangka Pendek	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

V.4. Peta Jalan Smart Living

Smart Living menitikberatkan pada harmonisasi tata ruang dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Selain itu juga menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan mempermudah akses terhadap sarana dan prasarana maupun layanan kesehatan. Lebih jauh lagi, membangun sarana transportasi dan logistik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun publik. Dimensi ini mendukung adanya kebutuhan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Maros. Peta jalan pengembangan smart living jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Living	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 7.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 7.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Maros Telemedicine (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat miskin difasilitas Kesehatan)	Jangka Panjang	100%	49.000.000.000	100%	53.000.000.000	100%	57.000.000.000	100%	61.000.000.000	100%	61.000.000.000	APBD dan Investas	Dinkes dan RSUD
							2028		2029		2030		2031		2032			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	APBD	Dinkes dan RSUD
							100%	65.000.000.000	100%	65.000.000.000	100%	69.000.000.000	100%	69.000.000.000	100%	73.000.000.000		

Tabel V - 11 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Living Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
							2023		2024		2025		2026				2027	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	15.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Aplikasi penyedia informasi terkait moda transportasi berupa halte, terminal serta rest area	Jangka Menengah	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C Yang Tersedia	15.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter			1 Unit	Rp430.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas pelayanan parkir yang memiliki izin				40 Lokasi	Rp10.200.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala				5000 Unit	Rp73.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	Rp470.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan				30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Jalan Kabupaten/Kota																
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang Memenuhi Standar				1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	-	-	APBD	DINAS PUTRPP

Tabel V - 12 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Living Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Harmonisasi Tata Ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penanganan Kawasan tidak layak huni	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi penyedia informasi terkait persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan melalui aplikasi SIMBG dan SIPETARUNG	Jangka Pendek	6600 Ha	Rp794.692.000,00	6650 Ha	Rp920.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Ruang Daerah yang perencanaannya sesuai dengan peruntukan					6600 Ha	Rp1.017.782.000,00	6650 Ha	Rp1.150.000.000,00	APBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Ruang Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukan				6600 Ha	Rp323.700.000,00	6650 Ha	Rp300.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya				6600 Ha	Rp504.736.000,00	6650 Ha	Rp200.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Aplikasi SIMRS, Sisrut, Vclaim, Sirsoline Kemenkes (Ketersediaan Informasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang telah berizin) Terintegrasi dengan sistem .BPJS	Jangka Pendek	15 Unit	169.857.299.142	100%	169.857.299.142	APBD	DINKES
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang disediakan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100%	42.655.002.534	100%	42.655.002.534	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah jenis data informasi kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan				100%	2.227.662.433	100%	2.227.662.433	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				100%	342.000.000	100%	342.000.000	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu				100%	399.269.679	100%	429.900.743	APBD	Dinas Kesehatan/RSU D
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	E- Rekam Medik	Quick Win	100%	49.000.000.000	100%	53.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan/RSU D
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Aplikasi Sistem Informasi PJU	Quick Win	179 Unit	Rp110.000.000,00	179 Unit	Rp110.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP

V.5. Peta Jalan Smart Society

Smart society akan membahas mengenai manusia sebagai unsur utama dalam pembangunan sebuah daerah. Smart society memiliki fokus pada pembangunan masyarakat yang pintar terutama dalam melakukan interaksi sosial guna mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah serta dengan melakukan pengembangan komunitas masyarakat, membangun sistem edukasi yang efisien dengan mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung serta membangun platform edukasi bagi masyarakat, dan menjamin keamanan dan keselamatan dengan mewujudkan sistem serta pengelolaan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dimensi ini menegaskan bahwa perkembangan daerah tidak hanya terkait infrastruktur, sarana, dan prasarana, melainkan juga kebutuhan untuk mencerdaskan masyarakat dalam perkembangan era digital. Peta jalan pengembangan smart society jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 13 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Society	Kegiatan : Pendidikan Nonformal/Kesetaraan/ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, Indikator Sub Kegiatan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan	2.1 Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Peningkatan Pembinaan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) (kegiatan : Biasanya kegiatan ini dalam bentuk Pelatihan Tata Rias)	Jangka Panjang	2	Rp150.00	3	Rp250.00	4	Rp300.00	4	Rp300.00	4	Rp300.00	APBD/A PBN	Disdikbud	
						5	Rp350.00	5	Rp350.00	6	Rp350.00	6	Rp400.00	7	Rp400.00			
						2028		2029		2030		2031		2032		APBD/A PBN	Disdikbud	
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			

			Nonformal/Kesetaraan																	
Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector		
							2023		2024		2025		2026		2027					
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	Penggunaan robot untuk mapping wilayah terdampak dan menghitung rasio kerugian	Jangka Panjang	14 Kecamatan	Rp154.883.250	14 Kecamatan	Rp154.883.250	14 Kecamatan	Rp154.883.250	14 Kecamatan	Rp156.000.000	14 Kecamatan	Rp156.000.000	APBD	BPBD		
							2028		2029		2030		2031		2032				Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
		14 Kecamatan	Rp159.000.000	14 Kecamatan	Rp159.000.000	14 Kecamatan	Rp159.000.000	14 Kecamatan	Rp163.000.000	14 Kecamatan	Rp163.000.000	APBD	BPBD							
									Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)											
		2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	Leading Sector							
Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran											
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4.1 Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-	Penggunaan teknologi untuk mencari dan mengevakuasi korban serta penyaluran logistik	Jangka Panjang	20 Kegiatan	Rp71.500.000	20 Kegiatan	Rp71.500.000	20 Kegiatan	Rp71.500.000	20 Kegiatan	Rp75.000.000	20 Kegiatan	Rp75.000.000	APBD	BPBD		
							2028		2029		2030		2031		2032				Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
		20 Kegiatan	Rp79.000.000	20 Kegiatan	Rp79.000.000	20 Kegiatan	Rp79.000.000	20 Kegiatan	Rp84.000.000	20 Kegiatan	Rp84.000.000	APBD	BPBD							
									Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)											
		2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	Leading Sector							
Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran											

		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prinsip bangunan hijau			2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran										
							200 Paket	Rp192.700.000	200 Paket	Rp192.700.000	200 Paket	Rp192.700.000	225 Paket	Rp216.787.000	225 Paket	Rp216.787.000	APBD	BPBD
							2028		2029		2030		2031		2032		Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran										
250 Paket	Rp238.466.000	250 Paket	Rp238.466.000	250 Paket	Rp238.466.000	275 Paket	Rp262.313.000	275 Paket	Rp262.313.000	APBD	BPBD							

Tabel V - 14 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Society Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan lokal masyarakat untuk pengembangan interaksi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Transformasi Layanan Edukasi dan Informasi bagi remaja dan anak berbasis Inklusi	Jangka Menengah	0,02 %	Rp100.000.000	0,02 %	Rp100.000.000	0,02 %	Rp100.000.000	0,02 %	Rp100.000.000	0,02 %	Rp100.000.000	APBD/APBN	DP3ADAL DUKB, DESA/KE LURHAN, MAMPU BaKTI, FORUM ANAK, DUTA GENRE

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengelolaan dan Pengembangan data dengan sistem Citra Satelit	Jangka Menengah	100 %	Rp2.150.000.000	100 %	Rp2.200.000.000	100%	Rp2.300.000.000	100%	Rp2.355.000.000	100 %	Rp2.355.000.000	APBD	Dinsos
Ekosistem belajar / pendidikan	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Kegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar	2.2 Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	Program Sekolah Penggerak/Smart School (jangka panjang)	Jangka Menengah	2 Sekolah	Rp159.422.000	3 Sekolah	Rp162.622.000	4 Sekolah	Rp127.672.000	4 Sekolah	Rp127.672.000	5 Sekolah	Rp127.672.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kegiatan : 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2 Sekolah	Rp77.175.000	3 Sekolah	Rp78.830.000	4 Sekolah	Rp78.830.000	4 Sekolah	Rp78.830.000	5 Sekolah	Rp78.830.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kegiatan : 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini				1 Sekolah	Rp15.345.000	2 Sekolah	Rp15.345.000	3 Sekolah	Rp15.345.000	3 Sekolah	Rp15.345.000	4 Sekolah	Rp15.345.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi Pencari Kerja Online (Seperti Sistem Linked In khusus di Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan perusahaan atau lembaga pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Jangka Menengah	1.245	Rp350.000.000	1.245	Rp350.000.000	1.265	Rp350.000.000	1.265	Rp350.000.000	1.270	Rp350.000.000	APBD	DPMPTSP K
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Menurun)	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Melakukan Operasi Yustisi/Non Yustisi bersama Instansi/Lembaga Terkait (TNI/POLRI, Dishub, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dalam penegakan Perda dan Perkada (SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA	Jangka Menengah	143 Kasus	Rp1.033.744.000	120 Kasus	Rp927.744.000	100 Kasus	Rp927.744.000	80 Kasus	Rp927.744.000	50 Kasus	Rp927.744.000	APBD/DA U	Satpol-PP dan Damkar

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
					RINGAN / TIPIRING)													
		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Desa Tangguh Bencana	Jangka Menengah	10	Rp94.350.000	10	Rp94.350.000	10	Rp94.350.000	14	Rp132.090.000	14	Rp132.090.000	APBD	BPBD
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Big Data Kebencanaan	Jangka Menengah	1 sistem	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000	1	Rp165.000.000	1	Rp165.000.000	APBD	BPBD
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 sistem	Rp22.500.000	1	Rp22.500.000	1	Rp22.500.000	1	Rp25.000.000	1	Rp25.000.000	APBD	BPBD
		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah penduduk pada kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	Sistem informasi bencana via smartphone : berupa alarm peringatan dini sebelum terjadi bencana	Jangka Menengah	391774 orang	Rp62.537.000	391.774	Rp62.537.000	391.774	Rp62.537.000	391.774	Rp70.000.000	391.774	Rp70.000.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				diminta secara daring														
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA (peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini dan melakukan pemadaman awal kebakaran) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) Desa/Kelurahan (Kecamatan Bantimurung Desa Mangaloreng dan Alatengae)	Jangka Menengah	8 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.8 85.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.8 85.000	20 Desa/Kelurahan	Rp1.020.8 85.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.8 85.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.8 85.000	APBD/DA U	Satpol-PP dan Damkar

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pemasangan sensor-sensor yang mampu mendeteksi potensi bencana: banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan longsor	Jangka Menengah	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	-	-	APBD	BPBD

Tabel V - 15 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Society Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan lokal masyarakat untuk pengembangan interaksi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan terhadap LSM dan Ormas. Indikator Kegiatan :Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pengembangan Fitur Aplikasi Siola Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)	Jangka Pendek	17%	Rp310.000.000	19%	Rp340.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan	Presentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika Dan Budaya Politik	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Uji Kompetensi Bagi Kader Perempuan Partai Politik	Jangka Pendek	20%	Rp935.000.000	20%	Rp975.000.000	APBD	BAKESBANGPOL

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL / Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Sistem layanan aduan dan penanganan PPKS terpadu	Jangka Pendek	100%	Rp100.000.000	100%	Rp50.000.000	APBD	Dinsos
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan terhadap LSM dan Ormas. Indikator Kegiatan :Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Membuat Aplikasi Sistem Pendaftaran dan Pengaduan terkait Aduan dan pendaftaran Ormas	Jangka Pendek	17%	Rp310.000.000	19%	Rp340.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
		Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota,Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dan Melibatkan Perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Transformasi Layanan pengaduan korban kekerasan berbasis Inklusi	Quick Win	100 %	Rp300.000.000	100 %	Rp325.000.000	APBD/ APBN	DP3ADALDUKB,DESA/KELURHAN,POLSEK,POLRES,PENGADILAN,DINSOS

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
Ekosistem belajar / pendidikan	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Kegiatan : 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Proses Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2.1 Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Nonformal/Lemba ga Kursus (English Camp)	Jangka Pendek	2 Kali	Rp200.000.000	4 Kali	Rp400.000.000	APBD/ CSR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	13.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Layanan Perpustakaan Elektronik (E-Book)	Quick Win	1 layanan (150 eksamplar)	Rp15.000.000	1 layanan (200 eksamplar)	Rp20.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	13.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Quick Win	9 perpustakaan per tahun	Rp164.000.000	9 perpustakaan per tahun	Rp164.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Penyampaian materi sosialisasi informasi rawan bencana melalui beberapa saluran : channel youtube, kunjungan ke sekolah-sekolah dan POSYANDU	Jangka Pendek	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	APBD	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Sistem peringatan dini cuaca buruk di laut secara mobile (Menggunakan Speed Boat yang sudah dimiliki)	Jangka Pendek	1	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000	APBD	BPBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran melalui Sistem	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengelolaan Adsense Media Sosial (Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter dan Tik Tok) Pemadam Kebakaran	Jangka Pendek	6 Jenis	N/A	6 Jenis	Rp11.427.455.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)		melalui HUMAS DAMKAR							
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran dan Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Dokumen Data Standar Kelayakan Alat Proteksi Kebakaran (Pasif/Aktif) Bangunan/Gedung/lingkungan Terintegrasi Melalui melalui Sistem Website/Aplikasi Smartphone	Jangka Pendek	2 Dokumen	Rp355.330.000	2 Dokumen	Rp403.333.333	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator Kegiatan: Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembuatan E-Book Wawasan Kebangsaan yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jangka Pendek	20%	Rp165.000.000	20%	Rp165.000.000	APBD	BAKESBANGPOL

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi konflik. Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dalam penanganan Konflik	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembentukan Kader Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial	Jangka Pendek	20%	Rp815.000.000	20%	Rp85.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
		Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Call Center Kebencanaan	Jangka Pendek	150	Rp133.355.000	150	Rp133.355.000	APBD	BPBD
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4.1 Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Ransel darurat di setiap rumah/ gedung pemerintahan	Jangka Pendek	50	Rp120.000.000	50	Rp120.000.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kekeringan)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik (Air Bersih)	4.1 Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pengadaan penampungan/ tangki air bersih untuk mengatasi kekeringan dengan skema kerjasama (MoU) bersama stake holder di Kab. Maros.	Jangka Pendek	1	Rp440.000.000	1	Rp440.000.000	APBD	BPBD
		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah penduduk pada kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Data dan Operasi)	Quick Win	391.774 Orang	Rp62.537.000	391.774 Orang	Rp62.537.000	APBD	BPBD
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Kurikulum pelatihan dan mitigasi bencana melalui kelas online atau akun influencer	Quick Win	100 Orang	Rp78.200.000	100 Orang	Rp78.200.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan dan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	'Paras Manis' ini yaitu Polisi Pamong Praja Siap Melayani dan Mengayomi masyarakat dengan Humanis yang bernuansa Hak Asasi Manusia" untuk menurunkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP hanya tukang gusur pasar, Razia dan Arogan.	Quick Win	365 Kasus	Rp11.658.946.000	365 Kasus	Rp11.193.946.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar

V.6. Peta Jalan Smart Environment

Dalam pembangunannya, smart environment memiliki pilar untuk melakukan perlindungan lingkungan dengan mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga melakukan pengelolaan terhadap sampah dan limbah dengan mengembangkan sistem dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, serta pembangunan tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan. Dimensi ini menyiratkan konsep pembangunan daerah harus selaras dengan konservasi lingkungan hidup. Dimensi ini menemukan sinergisitas pembangunan dan pelestarian lingkungan melalui program pembangunan yang berkelanjutan dengan risiko kerusakan alam yang minimal. Peta jalan pengembangan smart environment jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 16 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Environment		Program Pengelolaan sampah terpadu	Persentase sampah yang telah diolah menjadi bernilai tambah	12.3 Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Ubah Sampah Menjadi Emas	Jangka Panjang	5%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	15%	1.000.000.000	20%	1.000.000.000	25%	1.000.000.000	APBD	DPKPLH
							2028		2029		2030		2031		2032		Sumber Dana	Leading Sector
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
			12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota				25%	1.000.000.000	30%	1.100.000.000	30%	1.100.000.000	30%	1.100.000.000	35%	1.250.000.000	APBD	DPKPLH

Tabel V - 17 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Environment Tahun 2023-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector	
							2023		2024		2025		2026		2027				
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Database terkait Penyusunan dokumen lingkungan hidup dapat dikelola berbasis online.	Jangka Menengah	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	APBD	DPKPLH	
		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat daerah				1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	1	Rp250.000.000	APBD	DPKPLH	
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Aplikasi pelaporan terkait kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta aduan pengelolaan sampah dan memantau secara online kualitas lingkungan serta kondisi persampahan Kabupaten Maros	Jangka Menengah	63,70	Rp1.500.000.000	63,79	Rp1.500.000.000	63,87	Rp1.500.000.000	66,77	Rp1.500.000.000	66,80	Rp1.500.000.000	APBD	DPKPLH	
		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				63,70	Rp250.000.000	63,79	Rp250.000.000	N/A	Rp250.000.000	66,77	Rp250.000.000	66,80	Rp250.000.000	APBD	DPKPLH	
		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Usaha Sumber Pencemar yang Terpantau					32	Rp150.000.000	APBD	DPKPLH								
		Pengelolaan sampah	Jumlah sampah yang tertangani					198527 ton	Rp17.880.000.000	APBD	DPKPLH								

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan kampung iklim di setiap Desa/ Kelurahan Pengembangan sekolah Adiwiyata di setiap kecamatan	Jangka Menengah	100,00	Rp165.000.000	100,00	Rp165.000.000	100,00	Rp165.000.000	100,00	Rp165.000.000	-	-	APBD	DPKPLH
Tata kelola energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Program pengembangan listrik bersumber energi surya	Tingkat bauran energi terbarukan	3.9 Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas	Listrik tenaga surya	Jangka menengah	5%	Rp2.000.000.000,00	10%	Rp2.000.000.000,00	15%	Rp2.000.000.000,00	20%	Rp2.000.000.000,00	23%	2.000.000.000	APBN dan APBD	DPKPLH

Tabel V - 18 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Environment Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	Penyelesaian pegaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diselesaikan	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Sistem layanan pengaduan terkait lingkungan hidup secara online	Jangka Pendek	10	Rp150.000.000	10	Rp150.000.000	APBD	DPKPLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis msasyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penghargaan lingkungan hidup	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Tim pengolahan sampah bekerja dan beroperasi secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengeolahan sampah	Jangka Pendek	212116	Rp750.000.000	212116	Rp750.000.000	APBD	DPKPLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan	Jangka Pendek	100,00	Rp140.000.000	100,00	Rp140.000.000	APBD	DPKPLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu	BERLIN (Bersih Lingkungan)	Quick Win	93,22%	Rp57.865.000.000	94,21%	Rp60.575.000.000	APBD	DPKPLH

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
				terhadap jumlah sampah rumah tangga								
Tata kelola energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Kegiatan pengembangan energi terbarukan berbasis sampah di tingkat desa	Jumlah desa yang telah memanfaatkan limbah sebagai sumber energi	18.4 Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi 3.1 Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu	Kampung Hijau Energi	Jangka Pendek	2 desa	Rp30.000.000,00	4 desa	Rp30.000.000,00	APBD dan CSR	DPKPLH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Sistem layanan pengaduan terkait lingkungan hidup secara online	Jangka Pendek	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	APBD	DPKPLH

BAB VI. PENUTUP

Sebagai rangkaian dari buku Master Plan Smart city di Kabupaten Maros, Buku Kedua ini merupakan substansi utama terkait pembahasan program dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Kabupaten Maros dalam pengembangan Kota Cerdas. Program dan rencana aksi yang terkandung dalam buku ini selaras dengan arah pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026. Program-program dalam bukun ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jangka pendek 1-2 tahun, jangka menengah 3-5 tahun, serta jangka panjangn 6-10 tahun untuk menjalankan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan. Susunan program dan kegiatan inovasi smart city dalam buku ini juga dapat dijadikan sebagian acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkalan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya buku kedua ini, pembangunan smart city di Kabupaten Maros diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI ISO 37122. *Kematangan Kota Cerdas* . Badan Standardisasi Nasional.
- Citiasia Center for Smart Nation (CCSN). (2017). *Smart Nations: Mastering Nation's Advancement from Smart Readiness to Smart City* . Jakarta: Citiasia Inc.
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., Egaravanda, S. (2018). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- KOMINFO. (2022). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju Smart City*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2021). *RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026*. Maros: Pemerintah Kabupaten Maros.



**Masterplan Smart City
Kabupaten Maros | Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**